

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk.

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Berdasarkan arahan kebijakan oleh Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu :

1. Pengendalian kuantitas penduduk ditetapkan melalui perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk serta bertujuan agar dapat mewujudkan struktur penduduk tumbuh seimbang (PTS) secara berkelanjutan:
2. Peningkatan kualitas penduduk melalui meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan, meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

3. Pembangunan Keluarga melalui revitalisasi peran keluarga dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat ekonomi, sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan) serta Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga
4. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk melalui menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis, Penyusunan sistem informasi penduduk luar domisili secara terpadu dan transparan, Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang dan keluarganya, Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan penduduk local dengan pendatang serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
5. Penataan Administrasi Kependudukan

Mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS) serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat

Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk, peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan .

Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah tersebut. Aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem wilayah. oleh karena itu informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan

untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator outcome dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pilihan prioritas pagu indikatif pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan model kelembagaan demokrasi.

1.2 Tujuan Penyusunan Profil KKBPK

1.2.1 Tujuan Umum

Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan perkembangan kependudukan sehingga dapat tergali secara tepat permasalahan kependudukan yang diperlukan oleh para perumus kebijakan, pengambil keputusan dan perencana, terutama dalam mengintegrasikan aspek kependudukan dalam pembangunan di segala bidang.

1.2.2 Tujuan Khusus yaitu :

- 1) Mendeskripsikan aspek kuantitas pendudukan yaitu jumlah, komposisi dan distribusi penduduk
- 2) Mendeskripsikan aspek yang berkaitan dengan kuantitas penduduk, yaitu fertilitas dan keluarga berencana dan indikator kualitas penduduk seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi ketenagakerjaan, pembangunan keluarga, dsb.

1.3 Landasan Hukum

Latar belakang penyusunan profil KKBPK berdasarkan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

- Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Huruf N mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

1.4 Daftar Istilah

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

$$P_{t+1} = P_t + (B-D) + (M_i - M_o)$$

Dimana,

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

B = Jumlah kelahiran dari tahun t ke tahun t+1

D = Jumlah kematian dari tahun t ke tahun t+1

M_i = Jumlah migrasi masuk dari tahun t ke tahun t+1

M_o = Jumlah migrasi keluar dari tahun t ke tahun t+1

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk per tahun pada periode/waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right)$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke-t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

3. Komposisi Penduduk

Komposisi Penduduk adalah pengelompokan Penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dalam penyusunan profil ini, penduduk dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.

4. Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)

Rasio Jenis Kelamin menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya Penduduk laki-laki per 100 jumlah penduduk perempuan dengan rumus sebagai berikut:

$$SR = \frac{L}{P} \times 100$$

5. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang atau sekelompok wanita, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan.

6. TFR (Total Fertility Rate)

Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total), yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir masa reproduksinya

7. ASFR (Age Specific Fertility Rate)

Age Specific Fertility Rate (Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur) yaitu banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu

8. GFR (General Fertility Rate)

General Fertility Rate/Angka Kelahiran Umum merupakan banyaknya kelahiran per 1000 wanita yang berumur 15-49 tahun.

9. CWR (Child Woman Ratio)

Child Woman Ratio/Rasio antara jumlah anak berusia dibawah lima tahun (0-4 tahun) dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi

10. CBR (Crude Birth Rate)

Crude Birth Rate/Anga Kelahiran Kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun.

$$CBR = B/P \times 1000$$

11. GRR (Gross Reproduction Rate)

Gross Reproduction Rate (Angka Kelahiran Kotor) yaitu rata-rata banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama

masa reproduksi, tanpa mempertimbangkan kematian sampai masa reproduksi.

12. CPR (Contraceptive Prevalence Rate)

Persentase pasangan usia subur yg sedang menggunakan kontrasepsi

13. UKP (USIA Kawin Pertama)

Umur pertama kali seorang wanita menikah

14. Mortalitas (Kematian)

UN atau (*United Nations*) dan WHO (*World Health Organization*) membuat definisi „mati sebagai berikut: “Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanent, yang bias terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.”Pada definisi diatas, terlihat bahwa keadaan “mati” hanya bias terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup.

15. CDR (Crude Death Rate)

Crude Death Rate/Angka Kematian Kasar adalah besarnya kematian yang terjadi pada suatu periode (tahun) tertentu untuk setiap 1000 penduduk pada tengah tahun yang sama

16. IMR (Infant Mortality Rate)

Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate, yaitu banyaknya kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada suatu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

17. AHH (Angka Harapan Hidup)

Angka Harapan Hidup, yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang

18. In-Migration (Migrasi Masuk)

Migrasi Masuk dikatakan sebagai masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (*Area of Destination*).

19. Out-Migration (Migrasi Keluar)

Migrasi Keluar didefinisikan sebagai perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (*Area of Origin*).

20. Net-Migration (*Migrasi Neto*)

Migrasi Neto merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila Migrasi yang masuk lebih besar dari pada Migrasi Keluar, maka disebut Migrasi Neto Positif. Sedangkan jika Migrasi Keluar lebih besar dari pada migrasi Masuk, disebut Migrasi Neto Negatif.

21. Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk adalah penggolongan terbesar penduduk pada suatu daerah menurut keadaan geografis dan keadaan administratif politisnya.

22. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Penduduk disuatu wilayah pada tahun tertentu, dibagi dengan luas wilayahnya. Kepadatan Penduduk (*Population Density=PD*) Dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$SR = \frac{P}{W}$$

Dimana,

PD : *Population Density* atau Kepadatan penduduk

P : Jumlah Penduduk pada tahun tertentu

W : Luas wilayah pada tahun tertentu (Km²)

Kepadatan :

$$\text{Tahun 2018} = \frac{140.971}{33} = 4.271,8 \text{ orang}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{141.876}{33} = 4.299,3 \text{ orang}$$

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Jumlah penduduk tidak produktif (0-14 + 65 +)}}{\text{Usia 15 - 64 tahun}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{34.190 + 10.403}{97.283} = \frac{44.593}{97.283} \times 100 \\ &= 45.84 \% \end{aligned}$$

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah

Berdasarkan legenda, dahulu bangsa Tartar dari Asia Timur sempat menguasai daerah Blitar yang kala itu belum bernama Blitar. Majapahit saat itu merasa perlu untuk merebutnya. Kerajaan adidaya tersebut kemudian mengutus Nilasuwarna untuk memukul mundur bangsa Tartar. Keberuntungan berpihak pada Nilasuwarna, ia dapat mengusir bangsa dari Mongolia itu. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar sebagai Adipati Aryo Blitar I untuk kemudian memimpin daerah yang berhasil direbutnya tersebut. Ia menamakan tanah yang berhasil ia bebaskan dengan nama Balitar yang berarti kembali pulangnya bangsa Tartar. Akan tetapi, pada perkembangannya terjadi konflik antara Aryo Blitar I dengan Ki Sengguruh Kinareja yang tak lain adalah patihnya sendiri. Konflik ini terjadi karena Sengguruh ingin mempersunting Dewi Rayung Wulan, istri Aryo Blitar I Singkat cerita, Aryo Blitar I lengser dan Sengguruh meraih tahta dengan gelar Adipati Aryo Blitar II. Akan tetapi, pemberontakan kembali terjadi. Aryo Blitar II dipaksa turun oleh Joko Kandung, putra dari Aryo Blitar I. Kepemimpinan Joko Kandung dihentikan oleh kedatangan bangsa Belanda. Sebenarnya, rakyat Blitar yang multietnis saat itu telah melakukan perlawanan, tetapi dapat diredam oleh Belanda.

Kota Blitar mulai berstatus gemeente (kotapraja) pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan peraturan Staatsblad van Nederlandsche Indie No. 150/1906. Pada tahun itu, juga dibentuk beberapa kota lain di Pulau Jawa, antara lain Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Kota Magelang, Samarang, Salatiga, Madioen, Soerabaja, dan Pasoeroean. Dengan statusnya sebagai gemeente, selanjutnya di Blitar juga dibentuk Dewan Kotapradja Blitar yang beranggotakan 13 orang dan mendapatkan subsidi sebesar 11.850 gulden dari Pemerintah Hindia Belanda. Untuk sementara, jabatan burgemeester (wali kota) dirangkap oleh Residen Kediri. Pada zaman

pendudukan Jepang, berdasarkan Osamu Seirei tahun 1942, kota ini disebut sebagai Blitar-shi dengan luas wilayah 16,1 km² dan dipimpin oleh seorang shi-chō. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17/1950, Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah kota kecil dengan luas wilayah 16,1 km². Dalam perkembangannya, nama kota ini kemudian diubah lagi menjadi Kotamadya Blitar berdasarkan Undang-Undang No. 18/1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48/1982, luas wilayah Kotamadya Blitar ditambah menjadi 32,58 km² serta dikembangkan dari satu menjadi tiga kecamatan dengan dua puluh kelurahan. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999, nama Kotamadya Blitar diubah menjadi Kota Blitar.

2.2 Kondisi Geografis

Kota Blitar terletak antara 112014 BT hingga 112028 BT dan Garis Lintang 802 LS 808 LS berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dengan luas wilayah 33 Km². Topografi wilayah Kota Blitar secara umum adalah dataran rendah dengan sisi utara lebih tinggi dari selatan. Secara rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Sungai Lahar merupakan satu-satunya sungai yang mengalir di Kota Blitar. Hulu Sungai Lahar berada di gunung Kelud menuju ke sungai Brantas dengan panjang kurang lebih 7,84 km. Jenis tanah Regusol dan Litusol yang ada di Kota Blitar berasal dari gunung Kelud (vulkan). Jenis tanah tersebut mempunyai konsis-tensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap erosi. Hal ini menunjukkan tanah di Kota Blitar tergolong subur sehingga memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh subur.

Secara umum Kota Blitar dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Kepanjenkidul. Masing-masing Kecamatan memiliki 7 Kelurahan. Batas-batas wilayah propinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Batas Daerah :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Blitar

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Blitar

Tabel 1.1
Tabel Jumlah Kecamatan dan Kelurahan
Kota Blitar

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	RW
1	SUKOREJO	7	74
2	SANANWETAN	7	50
3	KEPANJENKIDUL	7	64
	JUMLAH	21	188

2.3 Kondisi Demografis

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Blitar meningkat, dan mencapai 150.371 jiwa pada tahun 2021 atau mempunyai pertumbuhan penduduk 0,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Menurut BPS Kota Blitar, dari total penduduk 150.371 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 74.811 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 75.560 jiwa atau mempunyai sex ratio sebesar 99,00. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Pada tahun 2021 kepadatan penduduk Kota Blitar meningkat 5,52 persen dibanding tahun 2020 atau mencapai 13.892 jiwa per km².

Dalam kurun waktu dua tahun angka ketergantungan penduduk Kota Blitar menurun. Pada tahun 2019 tercatat 46 dan pada tahun 2021 tercatat 33. Angka 33 di tahun 2021 mengartikan bahwa dari 100 penduduk produktif menanggung usia tidak produktif (usia muda dan usia tua) sebanyak 33 orang. Penurunan angka ketergantungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif mengalami penurunan. Diharapkan di tahun 2022 angka ketergantungan bisa diturunkan lagi, karena semakin kecil angka ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kondisi ekonomi suatu wilayah tersebut.

Dengan keberhasilan program keluarga berencana, dengan rata-rata jumlah anak di bawah 3 anak per rumah tangga, dapat diperkirakan ke depan bentuk piramida, lambat laun mulut gentongnya akan mengecil. Untuk

sepuluh tahun ke depan, stok penduduk produktif masih tercukupi. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi dari sebaran penduduk.

Penyediaan lapangan usaha untuk penduduk usia produktif harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah. Jangan sampai melimpahnya penduduk usia produktif tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Program pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan secara intensif. Untuk membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas dan berdaya saing, perlu sejak dini diperhatikan layanan kesehatan dan pendidikan. Program pendidikan dan kesehatan yang baik juga dapat meminimalisir atau bahkan mencegah lahirnya anak-anak stunting, karena pencegahan ini harus dimulai sedini mungkin, yaitu pada masa-masa remaja.

Sementara untuk sebaran usia tua, jumlah penduduk tua wanita jauh lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Kondisi itu menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya difokuskan bagi perempuan yang usia produktif dan muda, tetapi perlu juga dipikirkan untuk pemberdayaan perempuan yang usia lanjut.

2.4 Potensi Daerah

Secara Propinsi Kota Blitar adalah merupakan pemasok pangan yang terbatas sehingga kegiatan pertanian merupakan lapangan usaha yang sangat menentukan dalam struktur perekonomian Kota Blitar. Sektor lapangan usaha lainnya yang juga potensial adalah perdagangan, hotel, restoran, serta sektor industri pengolahan. Struktur kontribusi lapangan usaha yang demikian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Blitar sudah menampakkan perkembangan kearah kemantapan, yaitu perkembangan industri dan jasa yang di dukung oleh pertanian yang tangguh. Kemampuan perekonomian Kota Blitar yang seperti diuraikan diatas pada hakekatnya memberikan implikasi adanya potensi perkembangan dan pengembangan yang dapat dipacu lebih pesat pada masa - masa mendatang .

Lapangan usaha pertanian didalam struktur perekonomian Kota Blitar sampai saat ini masih tetap memegang peranan penting, hal tersebut nampak pada sumbangannya terhadap produk regional domestik bruto Kota Blitar. Selain peranannya terhadap struktur perekonomian daerah, Sub - sektor

pertanian rakyat juga mampu berperan terhadap stok pangan. Kota Blitar pada tahun mendatang tetap bertekad terus mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam rangka pelestarian swasembada pangan sebagaimana yang telah dicapai saat ini .

Nilai ekspor hasil perdagangan Kota Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkat, membuktikan bahwa iklim pembangunan dibidang perdagangan Kota Blitar semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dan terobosan - terobosan dipasaran potensial bagi ekspor migas dan non migas disamping mempertahankan serta terus meningkatkan volume dan nilai eksportnya. Sedangkan untuk koperasi Kota Blitar berupaya mewujudkan Propinsi Koperasi melalui gerakan nasional sadar koperasi serta menciptakan demokrasi ekonomi sampai ditingkat kelurahan.

Dari berbagai potensi pertambangan yang ada di Kota Blitar diharapkan pendapatan dari sektor pertambangan dapat semakin meningkat. Dalam rangka tata ruang, persebaran lokasi bahan tambang perlu diperhatikan dalam usaha pengamanan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu dalam hal pembangunan dibidang energi khususnya tenaga listrik di Kota Blitar menunjukkan peningkatan yang cukup besar.

Kepariwisataan di Kota Blitar pada hakekatnya adalah merupakan jasa pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang memiliki kekhususan seperti : budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam.

Potensi obyek wisata yang ada di Kota Blitar meliputi:

- Wisata Makam Bung Karno
- Sumber Udel Water Park
- Agriwisata Blimbing Kelurahan Karang Sari
- Makam Aryo Blitar Kelurahan Blitar
- Green Park Sentul Kelurahan Sentu
- Taman rekreasi Kebon Rojo

Potensi perkembangan kepariwisataan di Kota Blitar dapat digali dan ditingkatkan karena pemanfaatan saat ini maksimal. Hal ini terbukti dari masih kurangnya prasarana penunjang berupa jalan dan fasilitas lainnya serta kegiatan paket lainnya.

Sistem transportasi di Kota Blitar terdiri atas transportasi jalan raya dan kereta api. Secara keseluruhan sistem transportasi jalan raya.

Prasarana dan sarana transportasi yang ada, pada prinsipnya telah menjangkau hampir seluruh Kota Blitar

BAB III
GAMBARAN UMUM PROFIL KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

3.1 Kuantitas Penduduk

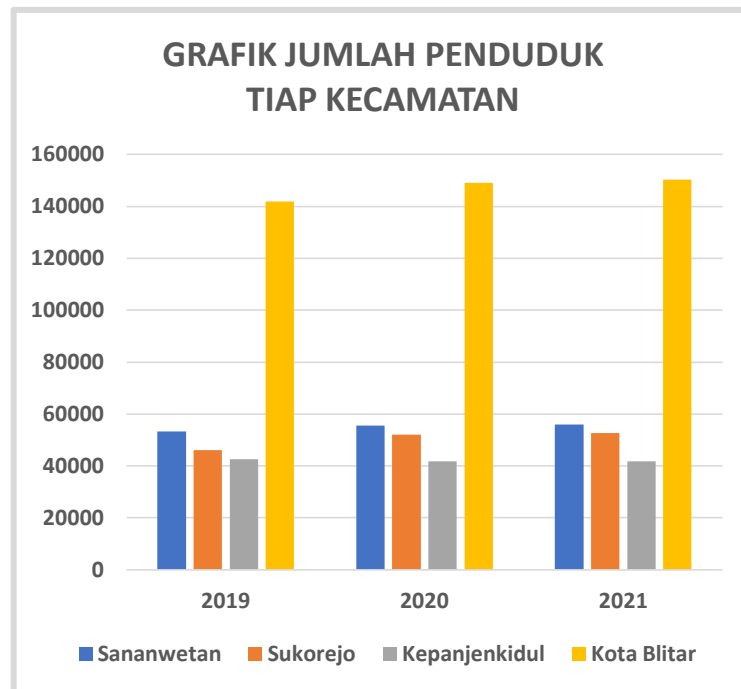
3.1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Blitar dari hasil proyeksi yaitu sebesar 150.371 jiwa pada tahun 2021 atau naik sebesar 0,8 % dibandingkan tahun 2020 sebesar 149.149 jiwa.

Tabel 3.1
 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
 2019, 2020 dan 2021

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA) POPULATION			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN/ANNUAL POPULATION GROWTH RATE (%)
	2019	2020	2021	2019-2021
1	2	3	4	5
1. Sananwetan	53.180	55.472	55.909	0,59
2. Sukorejo	46.059	51.998	52.642	0,93
3. Kepanjen kidul	42.637	41.679	41.820	0,25
Kota Blitar	141.876	149.149	150,371	0,61

Sumber : BPS Kota Blitar Dalam Angka 2021



Jumlah penduduk terbesar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berada di Kecamatan Sananwetan.

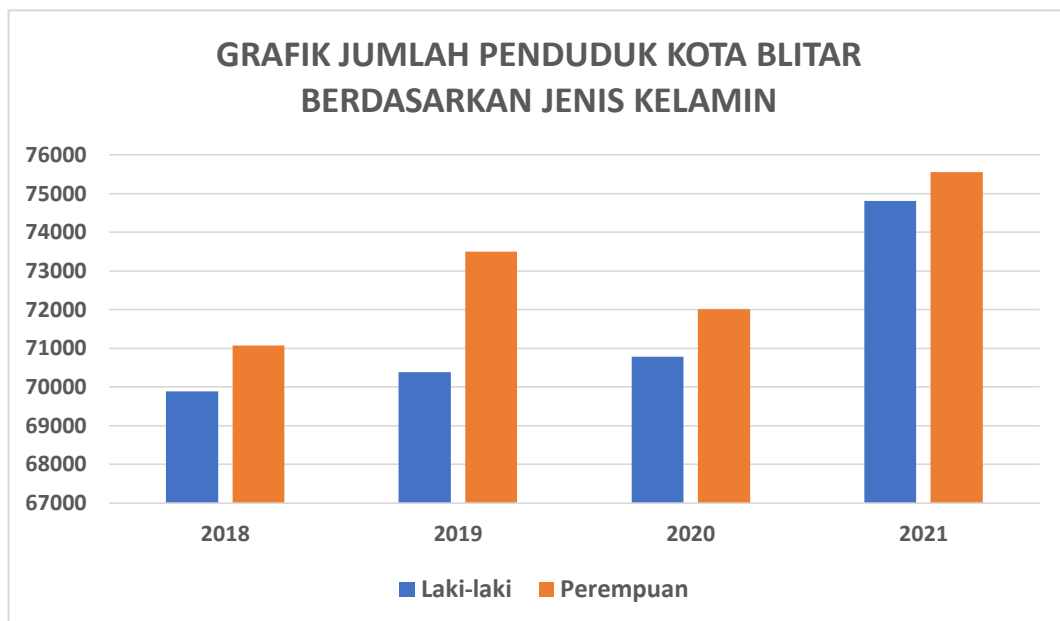
3.1.2 Komposisi Penduduk berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Status Menikah

Sex Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Jika sex ratio dikalikan 100 maka dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk perempuan terdapat sekian penduduk laki-laki. Pada umumnya sex ratio nilainya dibawah 100. Hal ini dikarenakan penduduk perempuan lebih tinggi angka harapan hidupnya sehingga penduduk perempuan menjadi lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Sex ratio dipakai untuk melihat perubahan penduduk menurut jenis kelaminnya. Dengan membandingkan besarnya sex ratio dari tahun sebelumnya akan membawa kita pada sebuah pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi. Perubahan itu bisa terjadi karena kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Blitar
Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2018	69.892	71.079	140.971	98,33
2	2019	70.378	73.498	141.876	98,43
3	2020	70.787	72.011	142.798	98,30
4	2021	74.811	75.560	150.371	99,00

Sumber : Proyeksi SP 2010



Pada tahun 2019 sampai dengan 2021, penduduk Kota Blitar yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki, hal ini dibuktikan dengan sex ratio dari tahun 2019-2021 sebesar 99,00% berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Blitar terbanyak ada di kelompok usia 35 tahun sampai dengan 39 tahun dan jumlah penduduk terendah ada pada kelompok

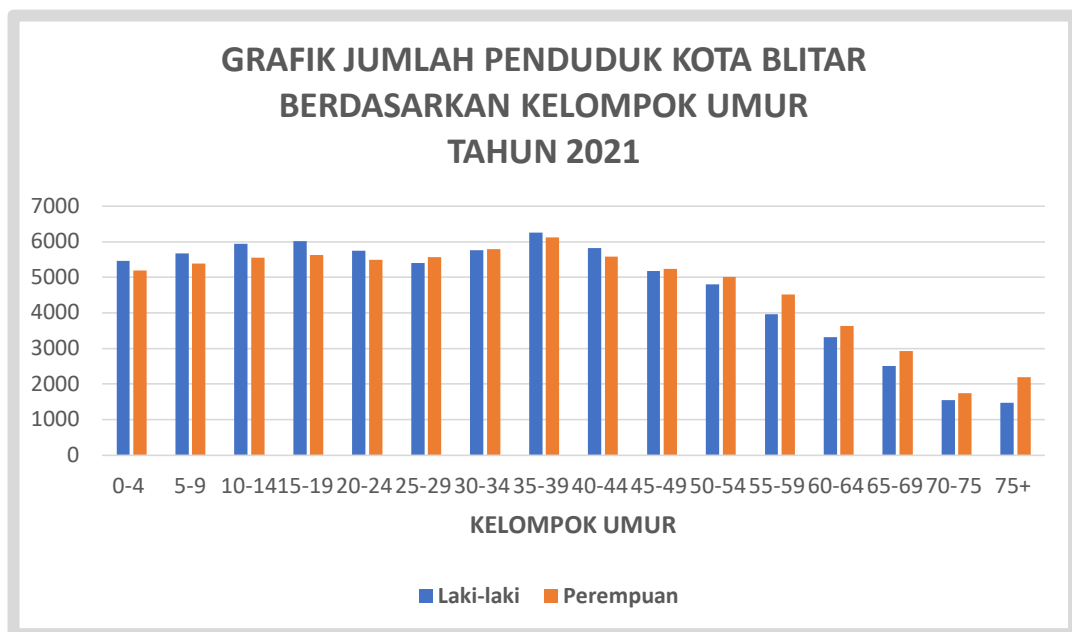
umur 70 tahun sampai dengan 75 tahun. Berdasarkan jenis kelamin bahwasanya untuk kelompok umur 75 tahun keatas jumlah penduduk lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yaitu 1.473 jumlah penduduk laki-laki dan 2.198 jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.3

Jumlah dan Prosentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Blitar Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN			%
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL	
1	2	3	4	5
0-4	5,459	5,190	10,649	7.08
5-9	5,668	5,393	11,061	7.36
10-14	5,934	5,549	11,483	7.64
15-19	6,012	5,633	11,645	7.74
20-24	5,752	5,486	11,238	7.47
25-29	5,402	5,571	10,973	7.30
30-34	5,757	5,787	11,544	7.68
35-39	6,257	6,114	12,371	8.23
40-44	5,813	5,584	11,397	7.58
45-49	5,173	5,235	10,408	6.92
50-54	4,794	5,004	9,798	6.52
55-59	3,958	4,519	8,477	5.64
60-64	3,315	3,625	6,940	4.61
65-69	2,505	2,928	5,433	3.61
70-75	1,539	1,744	3,283	2.18
75+	1,473	2,198	3,671	2.44
Jumlah/Total	74,811	75,560	150.371	100.00

Sumber : BPS Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2021



3.1.3 Jumlah Wanita Usia Subur

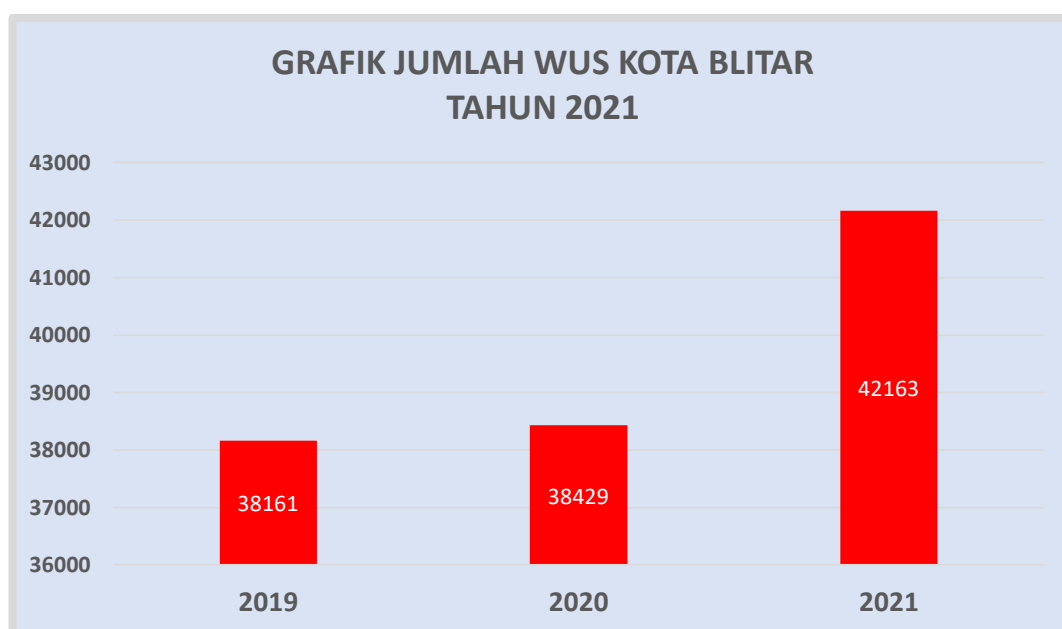
Wanita usia subur (WUS) berdasarkan konsep Departemen Kesehatan (2003) adalah wanita dalam usia reproduksi yaitu usia 15-49 tahun baik yang berstatus kawin, janda maupun yang belum menikah.

Wanita usia subur (WUS) yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para WUS diberi pengertian tentang apa saja yang perlu di siapkan sebelum menikah, misalnya pemeliharaan kesehatan dalam masa pranikah dan pasca kehamilan, hubungan seksual yang bebas, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Kesehatan pada masa pranikah disampaikan kepada kelompok wanita usia subur (WUS) yang akan melangsungkan pernikahan. Penyampaian tentang kesehatan pada masa pranikah ini disesuaikan dengan tingkat intelektual WUS sebagai para calon ibu. Informasi yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena bersifat pribadi dan sensitif.

Tabe 3.4
Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur Kota Blitar Tahun 2021

No	Tahun	Wanita Usia Subur (Umur)							Total
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1	Tahun 2019	6.198	4.997	5.487	5.340	5.275	5.526	5.339	38.161
2	Tahun 2020	6.241	5.032	5.525	5.378	5.311	5.565	5.377	38.429
3	Tahun 2021	6.120	5.909	5.893	5.827	6.965	5.980	5.469	42.163

Sumber: BPS Kota Blitar - Statistik Kesejahteraan Rakyat



Jumlah wanita usia subur (WUS) di Kota Blitar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat pesat terjadi di tahun 2021. Dengan demikian perlu ditingkatkan juga penyuluhan tentang kesehatan pada masa pranikah dan pasca kehamilan, hubungan seksual yang bebas, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan dengan tujuan agar wanita usia subur memahami informasi-informasi tersebut dan sudah siap pada saat memasuki jenjang pernikahan. Selain itu informasi-informasi tersebut juga dibutuhkan oleh wanita usia subur agar setelah menikah mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan bebas dari stunting.

3.1.4 Pasangan Usia Subur

Pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 21-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana, sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, PUS sangat mudah dalam memperoleh keturunan dikarenakan keadaan kedua pasangan tersebut normal, hal inilah yang menjadi masalah bagi PUS yaitu perlunya pengaturan fertilitas (kesuburan), perawatan kehamilan dan persalinan aman. Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut. Maka dari itu, petugas kesehatan harus memberikan penyuluhan yang benar dan dimengerti masyarakat luas.

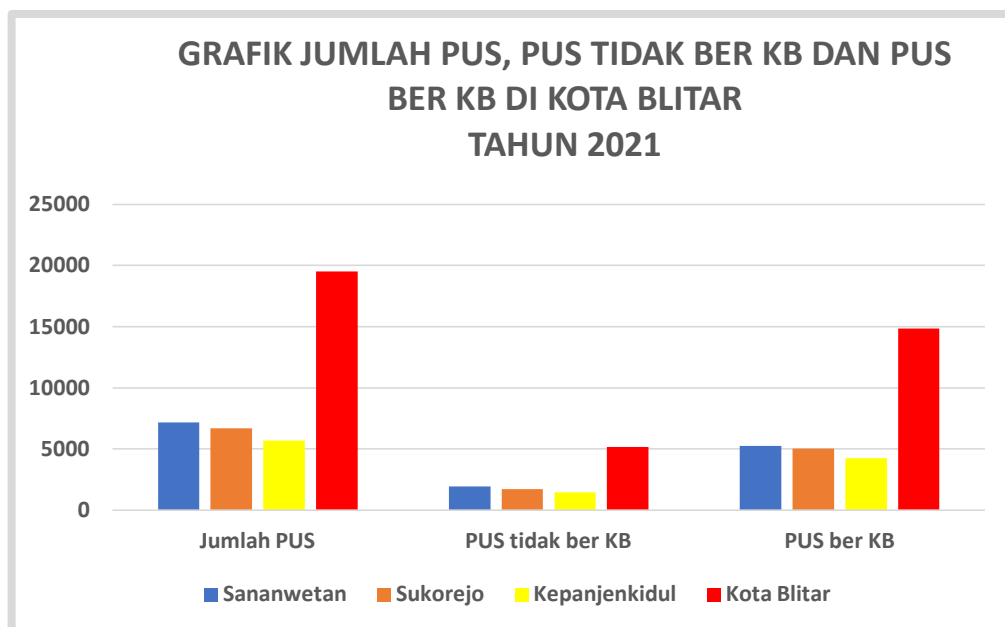
Dewasa ini, pemerintah melakukan suatu program dalam penekanan angka kelahiran karena kebanyakan penduduk Indonesia melakukan pernikahan dalam usia dini dimana masih banyak kesempatan/masa dimana keduanya memiliki keturunan yang banyak. Untuk itu, perlunya penyuluhan dalam mengatasi masalah tersebut dengan memperkenalkan alat kontrasepsi pada pasangan tersebut.

Para penyuluh KB dan petugas kesehatan harus memberi penyuluhan KB dan alat kontrasepsi, dan harus menyerahkan pilihan pada kedua pasangan tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan keinginannya dan kondisi fisiknya, karena kondisi fisik tiap-tiap orang berbeda.

Tabel 3.5
Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB dan Bukan Peserta KB
Kota Blitar Tahun 2021

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB	PUS PESERTA KB	
			JUMLAH	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kecamatan				
1	Sananwetan	7.144	1.910	5.234	73,26
2	Sukorejo	6.697	1.693	5.004	74,72
3	Kepanjenkidul	5.660	1.435	4.225	74,65
	Kota Blitar	19.501	5.136	14.856	74,17

Sumber : Laporan Statistik Rutin BKKBN Tahun 2021



Dari 150.371 penduduk Kota Blitar ada 19.501 Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur di Kota Blitar sebagian besar sudah sadar akan pentingnya merencanakan kehamilan demi kesehatan pasangan tersebut dan demi menjaga kualitas dari anak-anak mereka, hal ini bisa kita lihat dari perbandingan jumlah PUS yang ber KB dan jumlah PUS

yang tidak ber KB. PUS yang ber KB di Kota Blitar jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah PUS yang tidak ber KB. Jumlah PUS yang ber KB yaitu 14.856 dan jumlah PUS yang tidak ber KB yaitu 5.136. Meski demikian pemberian KIE tentang KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) harus tetap digiatkan dengan tujuan agar PUS yang belum ber KB sadar akan pentingnya KB dan segera ikut KB serta mempertahankan kesertaan ber KB PUS yang sudah ber KB sehingga mereka tidak putus KB atau yang biasa dikenal dengan Drop Out (DO).

3.1.5 Distribusi Penduduk

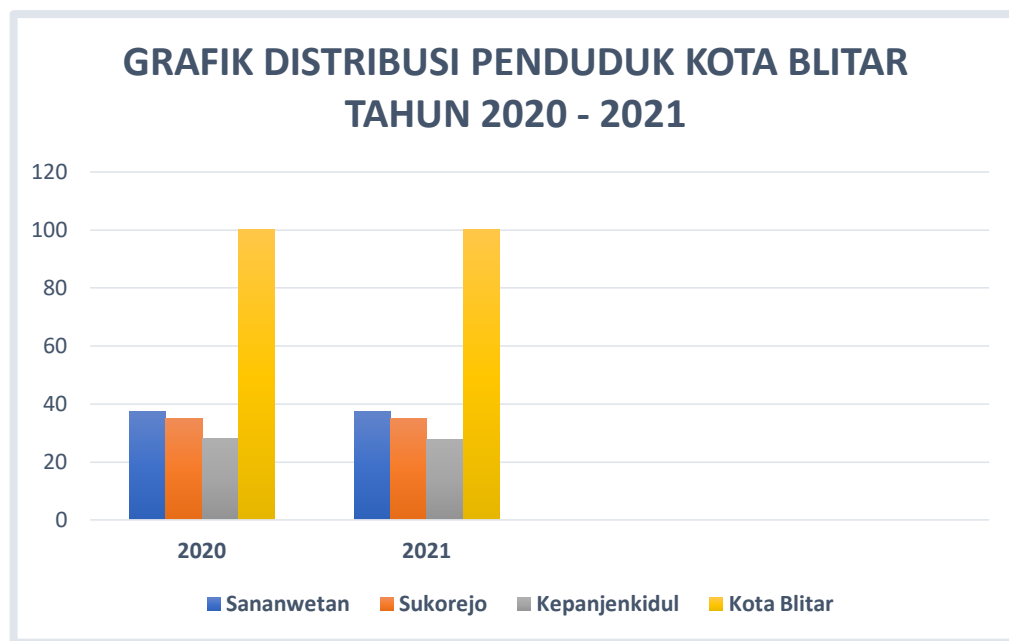
Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) sering dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah . Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang kongkrit dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran prosentasenya saja.

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Untuk Kota Blitar sendiri penyebaran penduduk di 3 Kecamatan juga mengalami perbedaan tetapi tidak terlalu mencolok. Hal ini disebabkan karena daya dukung lingkungan di tiap Kecamatan di Kota Blitar bias dikatakan sudah merata atau dengan kata lain tidak ada perbedaan daya dukung lingkungan antara Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kepanjenkidul.

Tabel 3.6
Distribusi Penduduk Kota Blitar Tahun 2021

KOTA BLITAR	PERSENTASE PENDUDUK	
	2020	2021
1	2	3
Kecamatan		
1. Sananwetan	37,19	37,18
2. Sukorejo	34,86	35,01
3. Kepanjenkidul	27,95	27,81
Kota Blitar	100,00	100,00

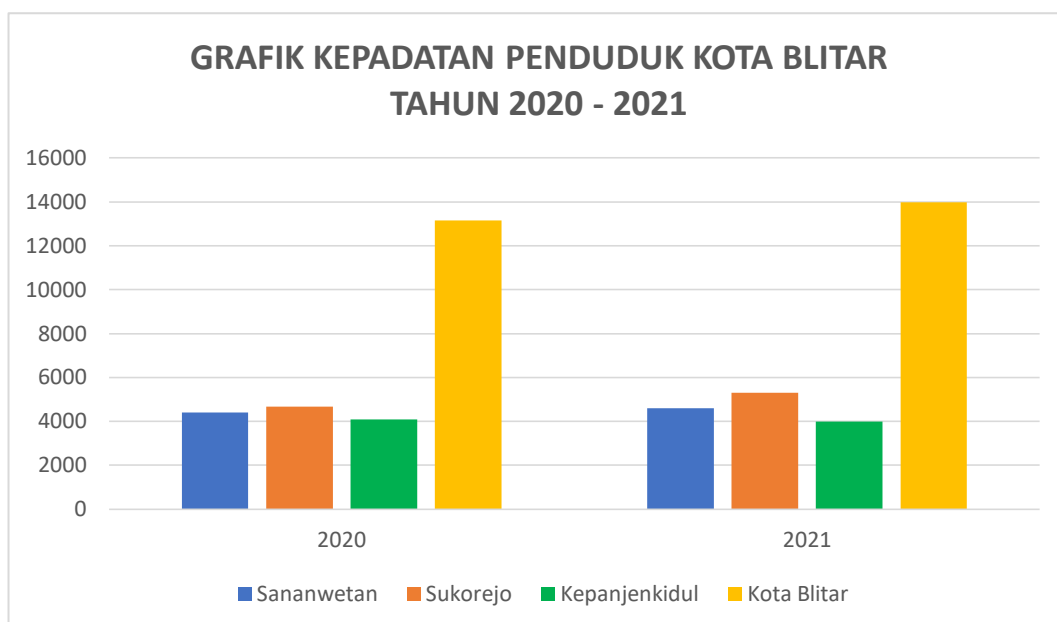
Sumber :



Tabel 3.7
Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun
Menurut Kecamatan Di Kota Blitar (per km²) Tahun 2021

KOTA BLITAR	KEPADATAN PENDUDUK	
	2020	2021
Kecamatan		
1. Sananwetan	4.408	4.602
2. Sukorejo	4.659	5.307
3. Kepanjenkidul	4.098	3.983
KOTA BLITAR	13.165	13.892

Sumber : Hasil proyeksi interim 2020 – 2023



3.2 Indikator Fertilitas

3.2.1 Angka Kelahiran Kasar / *Crude Birth Rate (CBR)*

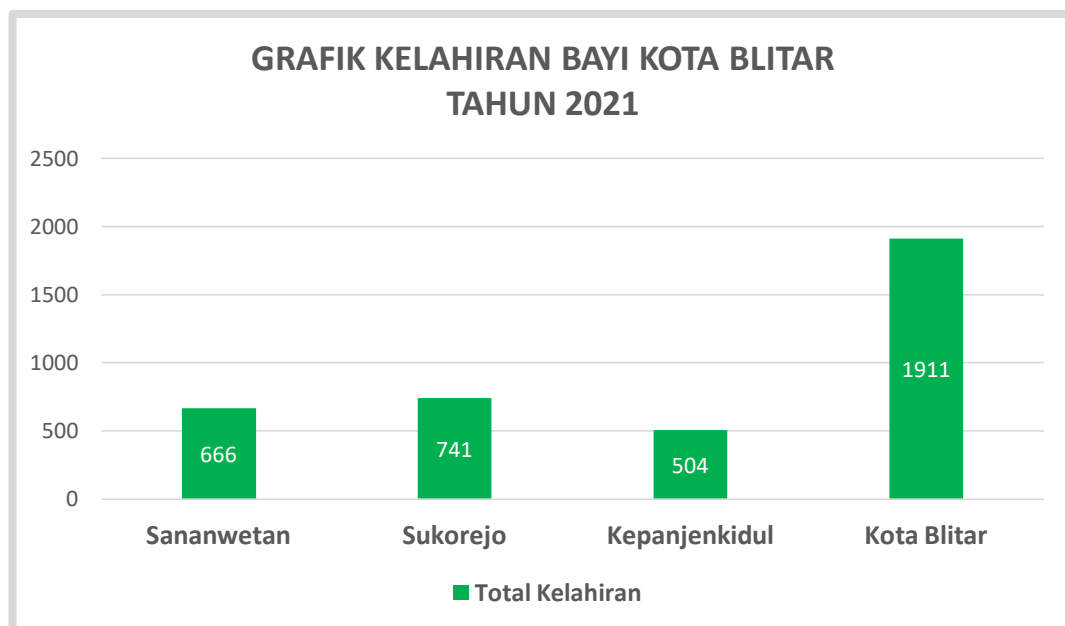
Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu negara atau wilayah (propinsi, kabupaten/kota) pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate (CBR)*. Nilai CBR dari masa ke masa dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan (kenaikan atau

penurunan) populasi penduduk di suatu negara atau wilayah dan dapat dibandingkan dengan negara-negara atau wilayah lain. Selain itu, nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan jumlah bayi lahir hidup dan jumlah ibu hamil.

Tabel 3.8
Angka Kelahiran Bayi Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Kelahiran Bayi		TOTAL
	L	P	
Kecamatan			
1. Sananwetan	344	322	666
2. Sukorejo	393	348	741
3. Kepanjenkidul	235	269	504
Kota Blitar	972	939	1.911

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Jumlah kelahiran di Kota Blitar pada tahun 2021 adalah 1.911. Tingkat kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Sukorejo yaitu 741 atau 38,78% dan tingkat kelahiran terendah berada di Kecamatan Kepanjenkidul yaitu 504 atau 26,37%.

3.2.2 Usia Kawin Pertama (UKP).

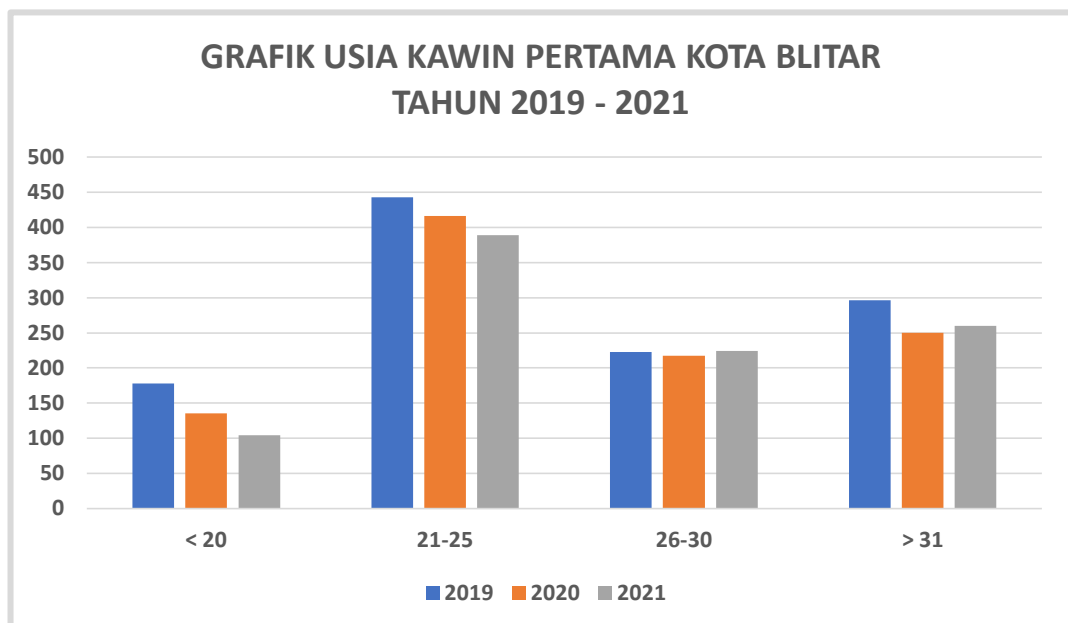
Perkawinan merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan hal ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dalam hal ini fertilitas. Secara teori pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada dasarnya mempengaruhi fertilitas melalui umur perkawinan. Semakin muda seseorang melakukan perkawinan makin panjang masa reproduksinya sehingga makin muda seseorang melangsungkan perkawinannya makin banyak pula anak yang dilahirkan. Rendahnya tingkat usia kawin pertama merupakan permasalahan krusial yang sedang dihadapi di beberapa negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, termasuk di Indonesia.

BKKBN melalui program Generasi Berencana (Genre) berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Salah satu upayanya adalah melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Usia minimal pernikahan berdasarkan PUP adalah 20 tahun bagi pemuda perempuan dan 25 tahun bagi pemuda laki-laki. Risiko yang ditimbulkan bagi perempuan hamil pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah risiko kesakitan dan kematian (BKKBN, 2013). Risiko tersebut meliputi risiko pada proses kehamilan dan pada proses persalinan. Pada proses kehamilan, risiko yang ditimbulkan antara lain keguguran, pre eklampsia, anemia, dan bayi meninggal dalam kandungan. Sedangkan pada proses persalinan, risiko yang ditimbulkan antara lain premature, berat bayi lahir rendah, kelainan bawaan, kematian bayi, bahkan hingga kematian ibu. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi pada wanita usia di bawah 20 tahun karena masih belum matangnya rahim perempuan usia muda untuk bereproduksi. Masih belum siapnya mental dalam berumah tangga juga menjadi salah satu penyebab munculnya risiko tersebut.

Tabel 3.9
Data Usia Kawin Pertama (UKP) Kota Blitar Tahun 2019 - 2021

Kota Blitar	Usia Kawin Pertama											
	2019				2020				2021			
	<20 TH	21-25 TH	26-30 TH	31 TH>	<20 TH	21-25 TH	26-30 TH	31 TH>	<20 TH	21-25 TH	26-30 TH	31 TH>
Kecamatan												
1. Sananwetan	52	140	86	92	38	159	82	84	34	141	92	87
2. Sukorejo	62	183	83	229	46	148	78	107	44	152	72	105
3. Kepanjenkidul	60	120	54	85	51	109	57	59	26	96	60	68
Kota Blitar	178	443	223	296	135	416	217	250	104	389	224	260

Sumber : Laporan Bulanan UKP (KUA se Kota Blitar)



Di Kota Blitar d a r i t a h u n tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 usia kawin pertama yang tertinggi adalah 21 tahun sampai dengan 25 tahun, ini sudah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh BKKBN, yaitu program Generasi Berencana (Genre), tetapi meski

demikian masih ada usia kawin pertama yang di bawah usia 20 tahun. Di tahun 2021 jumlah usia kawin pertama di bawah 20 tahun sebanyak 104. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 178 dan tahun 2020 yang berjumlah 135. Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kota Blitar selama ini sudah berhasil. Meski jumlah perkawinan di bawah usia 20 tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, sosialisasi tentang PUP harus tetap dilakukan agar di tahun – tahun berikutnya jumlah perkawinan di bawah usia 20 tahun tidak mengalami peningkatan dan bisa diturunkan lagi. Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bisa diberikan kepada remaja dan keluarga yang memiliki remaja melalui kegiatan BKR, PIK - R jalur sekolah maupun PIK - R jalur masyarakat.

3.3 Indikator Keluarga Berencana

3.3.1 Pasangan Usia Subur (PUS)

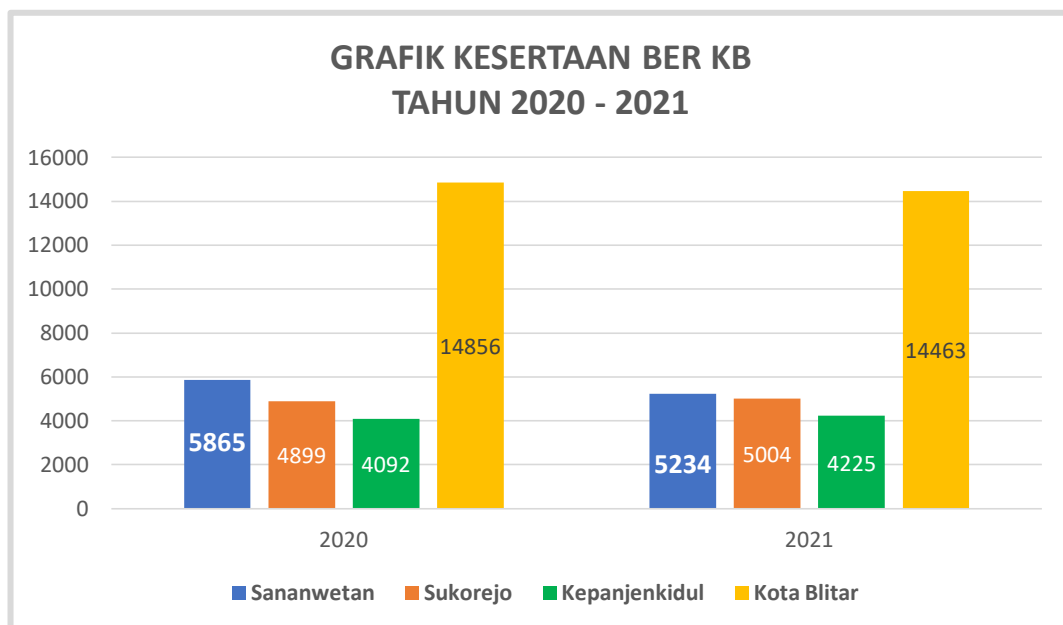
Berdasarkan data statistik rutin BKKBN untuk tahun 2021 PUS Kota Blitar yang ikut KB mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 jumlah PUS yang ber KB ada 14.856 sedangkan tahun 2021 jumlah PUS yang ber KB 14.463. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah karena jumlah PUS di tahun 2021 juga mengalami penurunan, yaitu dari 19.992 di tahun 2020 menjadi 19.501 di tahun 2021. PUS masih memiliki anak 1 dan ingin segera menambah anak, ada juga yang dikarenakan belum memiliki anak laki-laki atau perempuan sehingga PUS belum ingin ber KB, dan satu lagi yang sering terjadi yang membuat PUS belum ber KB adalah masih adanya rasa takut baik takut untuk ber KB maupun takut untuk datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan selama pandemi covid 19 di tahun 2021. Ini semua bisa diatasi dengan cara meningkatkan pemberian KIE di masyarakat, khususnya pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan perlu juga mengadakan pendekatan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar

tokoh-tokoh tersebut membantu mensosialisasikan tentang pentingnya ikut KB bagi Pasangan Usia Subur.

Tabel 3.10
Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Blitar
Tahun 2020-2021

Kota Blitar	JUMLAH PUS		PUS BUKAN PESERTA KB		PUS PESERTA KB	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kecamatan						
1. Sananwetan	7.872	7.144	2.007	1.910	5.865	5.234
2. Sukorejo	6.562	6.697	1.663	1.693	4.899	5.004
3. Kepanjenkidul	5.558	5.660	1.466	1.435	4.092	4.225
Kota Blitar	19.992	19.501	5.136	5.038	14.856	14.463

Sumber : Laporan Statistik Rutin BKKBN Tahun 2020 dan 2021



3.3.2 Angka Kesertaan ber-KB / Contraceptive Prevalensi Rate (CPR).

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif

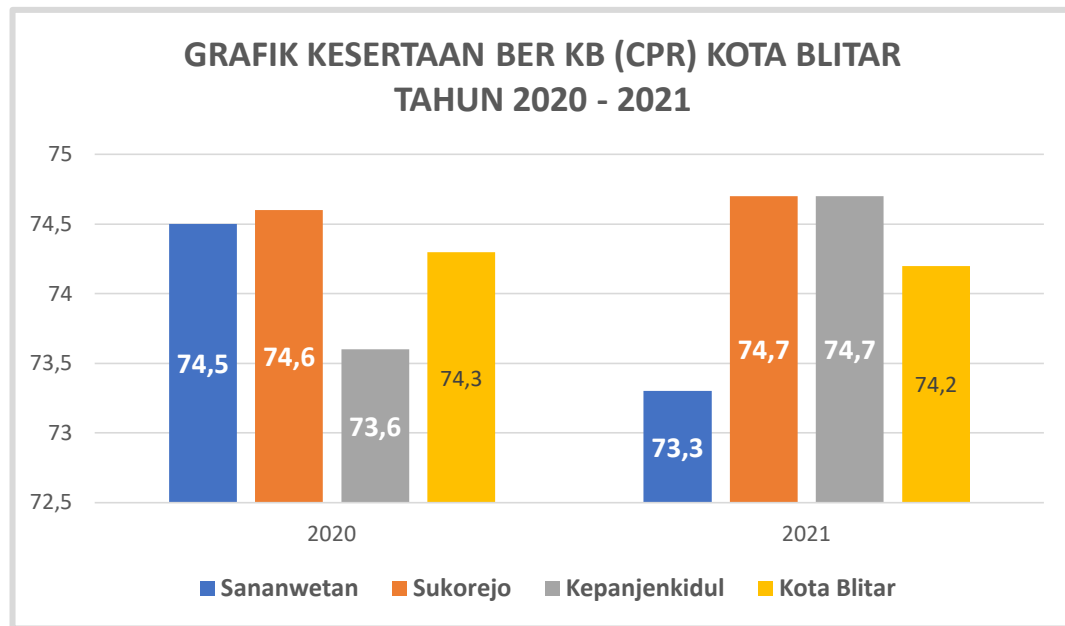
yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Cara menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100.

Tabel 3.11
Angka Kesertaan ber-KB (CPR) Kota Blitar
Tahun 2020-2021

Kota Blitar	CPR	
	2020	2021
Kecamatan		
1. Sananwetan	74,5	73,3
2. Sukorejo	74,6	74,7
3. Kepanjenkidul	73,6	74,7
Kota Blitar	74,3	74,2

Sumber : Statistik Rutin Tahun 2020 dan 2021



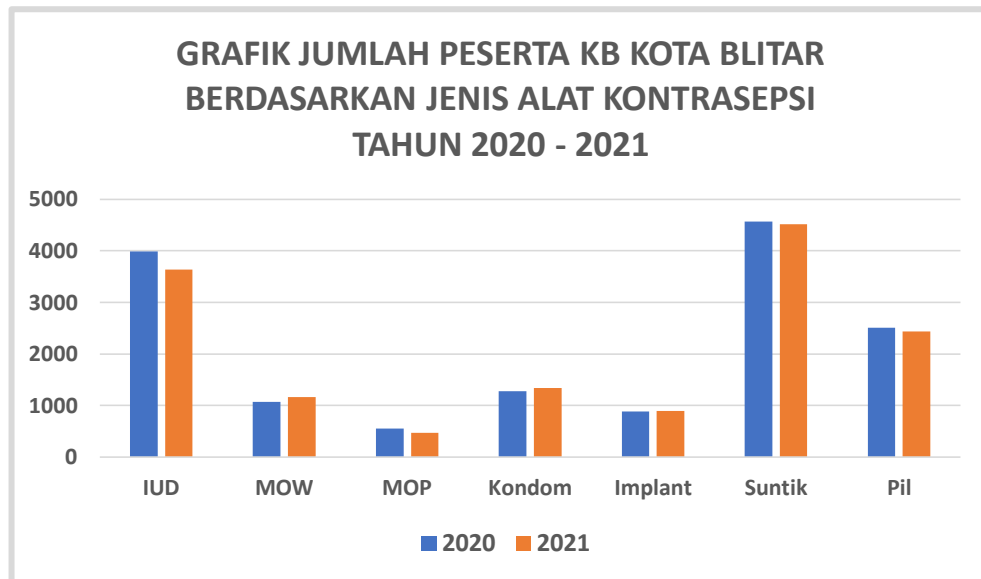
3.3.3 Jumlah Peserta KB Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi

Keluarga Berencana (KB) menurut WHO merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapat objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Sulistyawati, 2011). Alat kontrasepsi yang tersedia di Indonesia ada 2 jenis yaitu Non MKJP (kondom, suntik, pil) dan MKJP (IUD, implant, MOP, MOW). Kondisi yang ada di Indonesia masyarakat masih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, padahal alat kontrasepsi jangka pendek memiliki resiko kegagalan cukup tinggi. Meskipun tingkat efektivitasnya rendah metode Non MKJP masih banyak diminati oleh akseptor KB di Indonesia. KB Non MKJP yang paling banyak diminati adalah suntik.

Tabel 3.12
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi
Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2021

NO	Kota Blitar	IUD		MOW		MOP		KONDOM		IMPLANT		SUNTIK		PIL		JM	JML
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Kecamatan																
1	1. Sananwetan	1945	1513	554	634	258	175	452	413	291	281	1419	1370	946	848	5865	5234
2	2. Sukorejo	1091	1088	283	280	171	172	417	445	381	405	1770	1715	858	899	4899	5004
3	3. Kepanjenkidul	1029	1039	234	252	124	123	408	479	214	211	1383	1427	700	694	4092	4225
	Kota Blitar	3993	3640	1071	1166	553	470	1277	1337	886	897	4572	4512	2504	2441	14856	14463

Sumber : Statistik Rutin Tahun 2020 dan 2021



Hal ini juga terjadi di Kota Blitar. Berdasarkan data di atas pasangan usia subur di Kota Blitar pada tahun 2021 paling banyak menggunakan KB suntik, yaitu sebanyak 4.512. Meskipun mereka sudah diberikan KIE tentang dampak positif dan negative masing-masing alat kontrasepsi, tetapi mereka tetap banyak yang memilih suntik karena mereka merasa suntik itu lebih praktis dan tidak perlu memasukkan alat ke dalam tubuh. Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit peminatnya di Kota Blitar adalah MOP, yaitu sebesar 470 akseptor.

3.3.4 Unmet Need

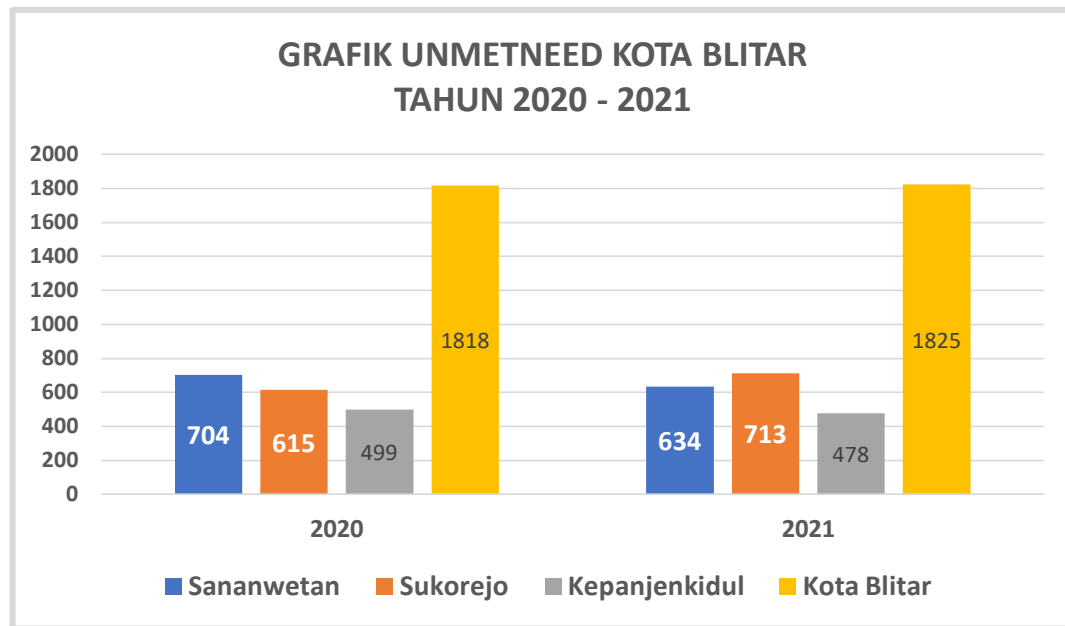
Unmet Need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need KB

dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk.

Tabel 3.13
Unmet Need Kota Blitar Tahun 2020-2021

Kota Blitar	Pasangan Usia Subur (PUS)		Bukan Peserta KB				Unmet Need			
			Ingin Anak Tunda		Tidak Ingin Anak		Jumlah		%	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. Sananwetan	7.872	7.144	372	319	332	315	704	634	8,94	8,87
2. Sukorejo	6.562	6.697	311	368	304	345	615	713	9,37	10,65
3. Kepanjenkidul	5.558	5.660	239	248	260	230	499	478	8,98	8,45
Kota Blitar	19.992	19.501	922	935	896	890	1.818	1.825	9,09	9,36

Sumber: Laporan Statistik Rutin Tahun 2020 dan 2021



Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya BKKBN memiliki target atau KPP Unmet Need KB sebesar 7,03%. Namun capaian dari tahun 2020 Unmet Need KB Kota Blitar sebesar 9,09 % dan tahun 2021 sebesar 9,36 %.

Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk ber KB masih belum optimal dan adanya rasa takut berkunjung ke fasilitas – fasilitas kesehatan selama pandemi covid 19, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan KIE di masyarakat khususnya pada pasangan usia subur dan mengadakan pendekatan pada tokoh formal, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3.4 Indikator Kualitas Penduduk

3.4.1 Kesehatan

3.4.1.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Kegunaannya Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena

bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa Timur semakin sehat. Semakin tinggi AHH suatu wilayah mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut semakin maju.

Tabel 3.14
Angka Kematian Bayi Kota Blitar
Tahun 2017-2021

Kota Blitar	Angka Kematian Bayi (AKB)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Blitar	10,91	13,78	11,93	11,80	5,76

Sumber : BPS Kota Blitar



Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 angka kematian bayi tertinggi di Kota Blitar terjadi pada tahun 2018, yaitu mencapai angka 13,78 %, tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 10,91 %. Namun pada tahun 2019 angka kematian bayi di Kota Blitar mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 angka kematian bayi di Kota Blitar menjadi 5,76 %. Dengan adanya penurunan angka kematian bayi di Kota Blitar dari tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kota Blitar sudah tergolong baik. Masyarakat Kota Blitar sudah sadar akan pentingnya kebersihan dan Kesehatan.

3.4.1.2 Cakupan Imunisasi Lengkap

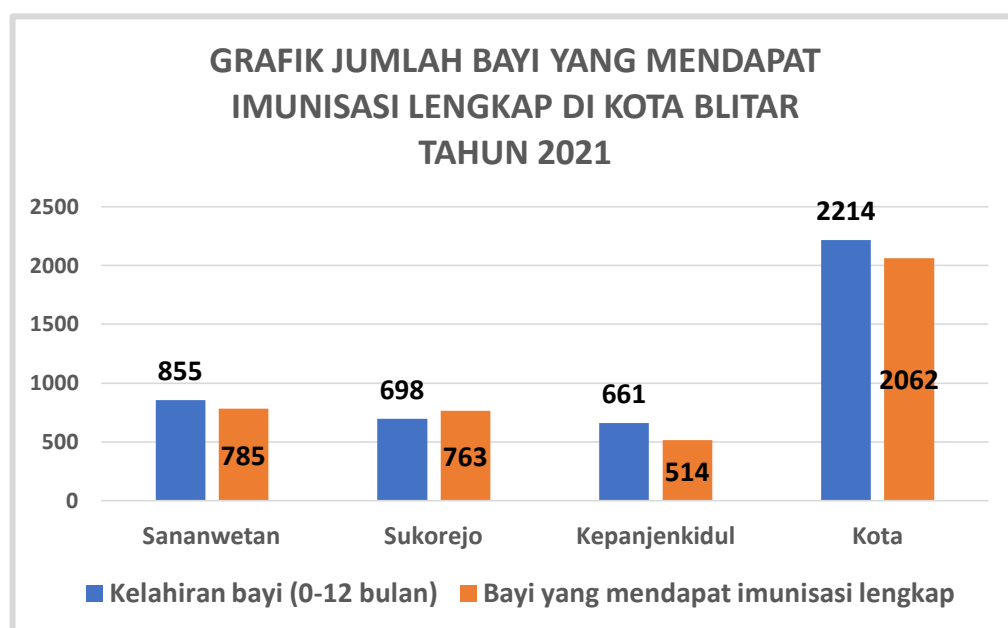
Tingkat kesehatan pada bayi perlu mendapatkan perhatian mengingat bayi atau anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu upaya untuk menjadikan generasi yang sehat yaitu dengan mengurangi tingkat kematian pada anak sehingga dibutuhkan suatu upaya kesehatan yang konsisten untuk melindungi anak dari penyakit salah satunya dengan pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu strategi

yang efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan nasional dengan mencegah enam penyakit mematikan, yaitu : tuberculosis, dipteri, pertusis, campak, tetanus dan polio.

Tabel 3.15
Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi Lengkap
Kota Blitar Tahun 2021

Kecamatan	Kelahiran Bayi (0-12 bulan)	Bayi Imunisasi Lengkap
1. Sananwetan	855	785
2. Sukorejo	698	763
3. Kepanjenkidul	661	514
Kota	2.214	2.062

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Berdasarkan data yang diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Kota Blitar, pada tahun 2021 bayi di Kota Blitar yang berjumlah 2.214, yang sudah mendapatkan imunisasi sejumlah 2.062. Jadi sekitar 93,13 % bayi di Kota Blitar sudah mendapatkan imunisasi. Ini mencerminkan bahwa orang tua di Kota Blitar sudah sadar akan pentingnya pemberian imunisasi

kepada bayi agar bayinya terhindar dari penyakit, terutama penyakit- penyakit yang mematikan.

3.4.1.3 Jumlah Bayi dengan Gizi Buruk

Untuk menunjang tumbuh kembangnya, anak-anak perlu mendapatkan makanan yang bergizi tinggi. Bila tidak terpenuhi dengan baik, bukan tidak mungkin sang buah hati mengalami gizi buruk. Tentu kondisi gizi buruk pada anak akan berdampak tidak baik bagi kesehatan dan tumbuh kembangnya.

Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup berpotensi mengalami komplikasi serta gangguan kesehatan jangka panjang, seperti:

1. Gangguan kesehatan mental dan emosional

Menurut *Children's Defense Fund*, anak-anak yang kekurangan asupan nutrisi berisiko menderita gangguan psikologis, seperti rasa cemas berlebih maupun ketidakmampuan belajar, sehingga memerlukan konseling kesehatan mental. Gizi buruk juga membawa dampak yang buruk bagi perkembangan dan kemampuan adaptasi anak pada situasi tertentu.

Sebuah studi "*India Journal of Psychiatry*" tahun 2008 mencatat dampak dari gizi buruk pada anak, yaitu:

- Kekurangan zat besi menyebabkan gangguan hiperaktif
- Kekurangan yodium menghambat pertumbuhan
- Kebiasaan melewatkan waktu makan atau kecenderungan pada makanan mengandung gula juga berkaitan dengan depresi pada anak.

2. Tingkat IQ yang rendah

Menurut data yang dilansir pada *National Health and Nutrition Examination Survey*, anak- anak dengan gizi buruk

cenderung melewati pelajaran di kelas sehingga anak tidak naik kelas. Anak menjadi lemas, lesu, dan tidak dapat bergerak aktif karena kekurangan vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya.

Hal ini didukung oleh data *World Bank* yang juga mencatat hubungan antara gizi buruk dan tingkat IQ yang rendah. Anak-anak ini juga mungkin mengalami kesulitan mencari teman karena masalah perilaku mereka. Gagalnya anak untuk mencapai aspek akademis dan sosial akibat gizi buruk tentu saja memiliki dampak negatif yang berkelanjutan sepanjang hidupnya apabila tidak segera disembuhkan.

3. Penyakit infeksi

Dampak gizi buruk lainnya yang kerap kali terjadi adalah risiko penyakit infeksi. Ya, anak dengan gizi yang kurang akan sangat rentan mengalami penyakit infeksi. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuhnya yang tak kuat akibat nutrisi tubuh yang tidak terpenuhi.

Ada banyak vitamin dan mineral yang sangat memengaruhi kerja sistem kekebalan tubuh, misalnya vitamin C, zat besi, dan zink. Bila kadar nutrisi tersebut tidak tercukupi maka sistem kekebalan tubuhnya juga buruk.

Belum lagi jika ia kekurangan zat gizi makro seperti karbohidrat dan protein yang merupakan sumber energi dan pembangun sel-sel tubuh. Kekurangan nutrisi tersebut akan membuat fungsi tubuhnya terganggu.

4. Anak pendek dan tidak tumbuh optimal

Pertumbuhan dan perkembangan si kecil terhambat adalah dampak gizi buruk pada anak. Ketika mengalami masa pertumbuhan, si kecil sangat memerlukan zat protein yang diandalkan untuk membangun sel-sel tubuh dan karbohidrat sebagai sumber energi utama tubuh.

Bila tidak ada protein dan zat nutrisi lainnya, maka bukan tidak mungkin pertumbuhan si kecil terhambat bahkan berhenti sebelum waktunya.

Maka untuk terus memantau kesehatan sang buah hati, apalagi jika ia masih dalam usia di bawah lima tahun. Dengan mengetahui status gizinya, akan mengetahui apakah perkembangan si kecil normal atau itu. Untuk itu, sebaiknya selalu periksakan anak ke dokter dengan rutin.

Tabel 3.16
Jumlah Bayi Gizi Buruk
Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Kelahiran Bayi (0-12 Bulan)	Bayi Gizi Buruk
Kecamatan		
1. Sananwetan	666	3
2. Sukorejo	741	4
3. Kepanjenkidul	504	0
Kota Blitar	1.911	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar



Pada tahun 2021 di Kota Blitar dari 1.911 kelahiran bayi (0-12 bulan), ada 7 kasus gizi buruk pada bayi atau sekitar 0,37 %. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus gizi buruk pada bayi di Kota Blitar jumlahnya tidak banyak. Hal ini disebabkan karena semua elemen di Kota Blitar, baik dari pemerintah maupun masyarakat sudah menyadari akan pentingnya memperhatikan gizi khususnya pada bayi. Meskipun jumlah kasus gizi buruk pada bayi jumlahnya tidak banyak, kita masih harus tetap mensosialisasikan tentang pentingnya memperhatikan gizi bayi agar di tahun 2023 tidak ada lagi kasus gizi buruk pada bayi.

3.4.1.4 Jumlah Pemberian ASI Eksklusif

World Health Organization (WHO) sejak tahun 2002 telah membuat standar tentang makanan bayi, termasuk ASI. WHO merekomendasikan agar proses menyusui dimulai sedini mungkin hingga Si Kecil berusia 6 bulan. Selama masa ini, Si Kecil hanya diperbolehkan minum ASI saja. Setelah 6 bulan, barulah Si Kecil boleh dikenalkan dengan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI). Namun, WHO tetap menyarankan pemberian ASI tetap diteruskan hingga Si Kecil berusia 2 tahun atau lebih.

Manfaat ASI eksklusif bagi Bayi, ada beberapa fakta penting yang perlu diketahui tentang ASI:

1. ASI Merupakan Sumber Nutrisi

ASI mengandung nutrisi yang penting bagi Si Kecil. Salah satunya, sebagai sumber energi terbaik. Untuk Si Kecil usia 6-12 bulan, ASI dapat memberikan setengah atau lebih dari kebutuhan energinya, sementara setelah memasuki usia 12-24 bulan sepertiga dari kebutuhan energinya bisa terpenuhi dari ASI. Selain itu, saat sakit ASI juga berperan penting sebagai asupan nutrisi bagi Si Kecil. Bahkan, menurut informasi dari WHO, pemberian ASI secara eksklusif bisa kurangi angka kematian anak-anak yang kekurangan gizi

2. Melindungi Si Kecil dari Infeksi

Memberikan ASI dalam waktu satu jam setelah melahirkan dapat melindungi Si Kecil dari infeksi penyakit, salah satunya diare. Dengan begitu, angka kematian anak akibat infeksi ini bisa dikurangi..

3. Mendukung Kecerdasan Si Kecil

Dalam jangka panjang, pemberian ASI bisa mendukung Si Kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas. Berdasarkan penelitian yang dilansir WHO, anak yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi. Selain itu, semakin lama usia menyusui, juga berhubungan dengan berkurangnya risiko gangguan mental pada anak.

4. Sistem Kekebalan Tubuh Pertama Si Kecil

Air Susu Ibu sering juga disebut sebagai „darah putih“, karena mengandung sel-sel yang berperan penting dalam melawan kuman-kuman jahat penyebab penyakit dan juga merupakan sistem imun pada saluran cerna Si Kecil setelah lahir. Di dalam kandungan ASI, peneliti menemukan sel-sel

yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh bagi Si Kecil, di antaranya makrofag, limfosit, dan kolostrum.

5. Menyusui Bisa Membantu Ibu Lebih Sehat

Menyusui juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan Ibu, karena dapat mengurangi risiko kanker ovarium dan juga payudara. Pemberian ASI eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir hingga bayi berumur 6 (enam) bulan, dan dianjurkan dilanjutkan hingga anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makan tambahan yang sesuai.

Mengacu pada hal tersebut maka pertanyaan mengenai pemberian ASI dalam susenas 2017 ditujukan pada baduta.

3.5 Pendidikan

3.5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan

sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

$$\text{APS 7 – 12 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 13 – 15 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

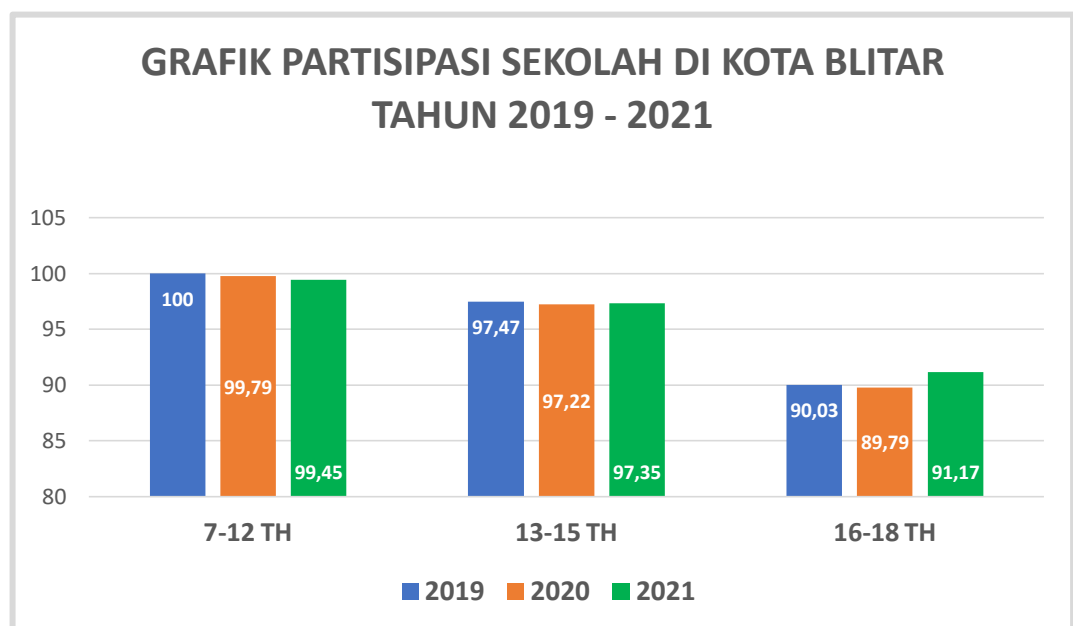
$$\text{APS 16 – 18 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APS 19 – 24 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Tabel 3.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Usia 7-12			Usia 13-15			Usia 16-18		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kota Blitar	100,00	99,79	99,45	97,47	97,22	97,35	90,03	89,79	91,17

Sumber : BPS (Laporan Eksekutif Pendidikan Prov.Jatim)



Rata-rata APS di Kota Blitar untuk usia 7-12 tahun sudah tinggi meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dari 99,79 % di tahun 2020 menjadi 99,45 % di tahun 2021. Sedangkan untuk usia 13-15 tahun, di tahun 2020 mencapai 97,22% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 97,35%. Untuk usia 16-18 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Blitar mengalami peningkatan juga sama seperti APS untuk usia 13-15 tahun, yaitu 89,79% di tahun 2020 dan di tahun 2021 mencapai 91,17%. Berarti dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Blitar telah memperoleh Pendidikan 9 tahun, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena selain penduduk Kota Blitar sadar akan pentingnya pendidikan juga karena adanya peran aktif dari Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong agar penduduk Kota Blitar bisa mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan 9 tahun yang dimulai dari SD sampai dengan SMU. Peran aktif Pemerintah Kota Blitar diantaranya adalah mengeluarkan peraturan sekolah gratis untuk sekolah negeri dan menyediakan transportasi gratis untuk anak sekolah berupa bus sekolah dan sepeda yang dipinjamkan kepada anak-anak sekolah.

3.5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang tertentu dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia tertentu dikalikan seratus.

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APK PT} = \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Tabel 3.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Usia 7-12 th			Usia 13-15 th			Usia 16-18		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kota Blitar	102,67	101,83	100,76	95,45	100,67	103,03	110,14	105,91	106,09

Sumber : BPS (Laporan Eksekutif Pendidikan Prov.Jatim)



APK SD di Kota Blitar pada tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 APK SD mencapai 101,83% dan pada tahun 2021 APK SD Kota Blitar menjadi 100,76%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah PUS dan peningkatan kesertaan ber KB di Kota Blitar, sehingga berkurang juga jumlah anak yang berusia 7-12 tahun. Untuk APK SMP pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, yaitu 100,67% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 103,03%. Sedangkan APK SMA pada tahun 2020 pencapaiannya sekitar 105,91 % dan pada tahun 2021 menjadi 106,09%.

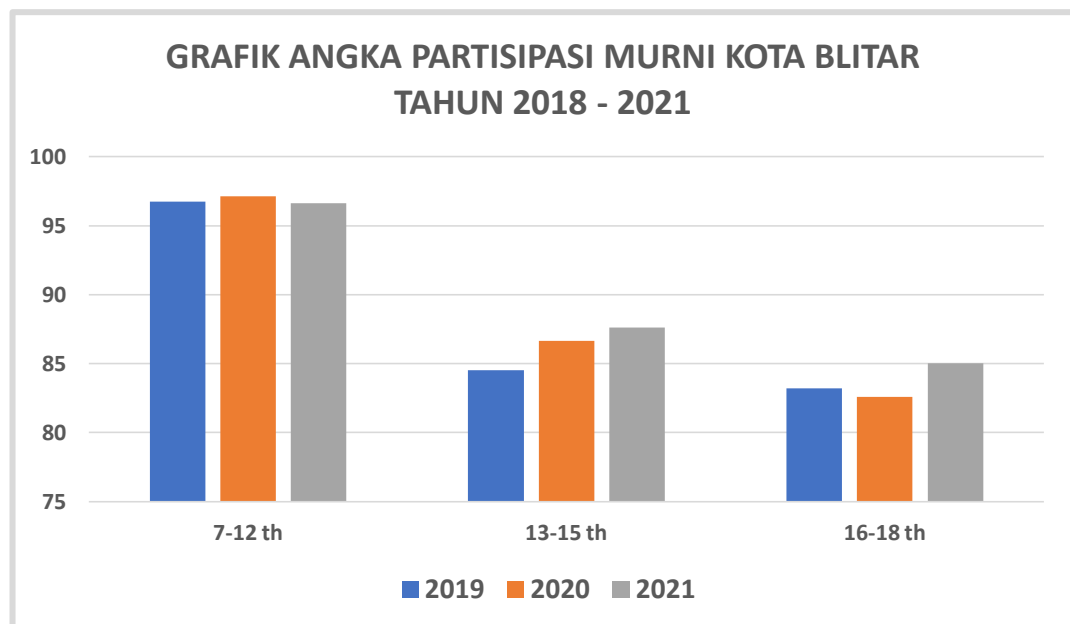
3.5.3 Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Tabel 3.19
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Blitar Tahun 2021

Kota	usia 7-12 th			Usia 13-15 Th			Usia 16-18 Th		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kota Blitar	96,76	97,12	96,62	84,52	86,63	87,62	83,22	82,58	85,02

Sumber : BPS (Laporan Eksekutif Pendidikan Kota Blitar)



Pada tahun 2021 ada kelompok usia APM Kota Blitar yang menunjukkan penurunan, yaitu pada kelompok usia 7-12 tahun hal ini bukan disebabkan karena kurangnya minat bersekolah penduduk Kota Blitar, tetapi hal ini disebabkan karena jumlah PUS yang

mengalami penurunan dan mereka sudah sadar untuk ikut KB, sehingga mereka betul-betul menjaga jarak kelahiran dan juga membatasi jumlah anak, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah kelompok usia 7-12 tahun.

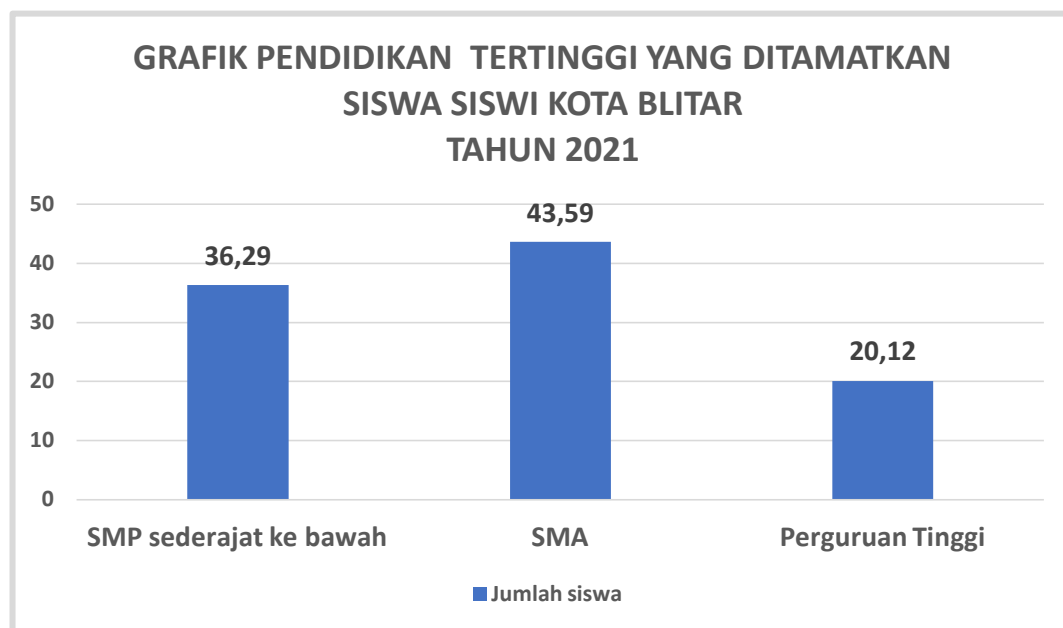
3.5.4 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula dengan kemampuan melakukan interaksi sosial. Meskipun sebetulnya pendidikan dapat diperoleh di luar jalur formal, seperti di balai pelatihan keterampilan, forum-forum diskusi, kelompok-kelompok belajar pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat lainnya.

Tabel 3.20
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
Kota Blitar Tahun 2021

Kota	SMP Sederajat Ke Bawah	SMA Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
Kota Blitar	36,29	43,59	20,12	100,00

Sumber : BPS (Laporan Eksekutif Pendidikan Prov.Jatim)



Berdasarkan data BPS tahun 2021 bahwa di Kota Blitar pendidikan tertinggi yang ditamatkan umumnya pada tingkat SMA sederajat yaitu sebesar 43,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Blitar tergolong baik.

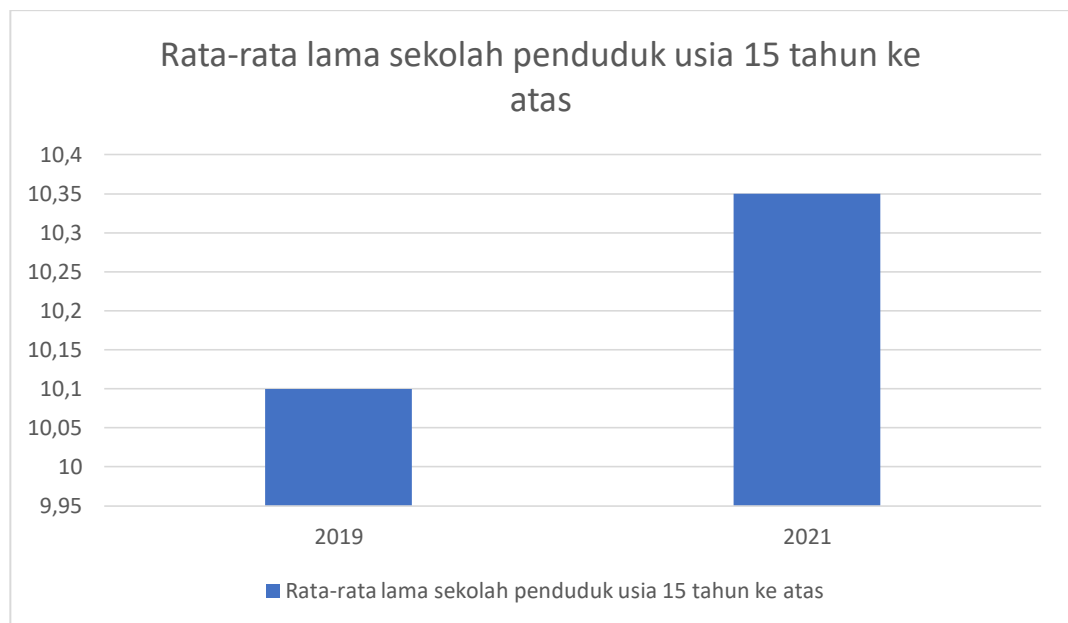
3.5.5 Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat juga digambarkan melalui indikator rata-rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau *years of schooling*, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir.

Tabel 3.21
Rata-rata Lama Sekolah
Kota Blitar Tahun 2021

Kota	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Kota Blitar	10,10	10,35

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Kota Blitar



Rata-rata lama sekolah di Kota Blitar pada tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari 10,10 pada tahun 2019 menjadi 10,35 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2021 penduduk Kota Blitar yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,35 tahun atau sudah hampir menamatkan kelas XI.

3.5.6 Jumlah Sekolah, Tenaga Pegajar dan Murid

Berdasarkan data BPS, banyaknya sekolah SD selama tahun 2021 yang tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Blitar sebanyak 73 sekolah dengan jumlah murid 17.303 dan jumlah guru 1.086. Sedangkan untuk SMP selama tahun 2021 yang tercatat sebanyak 27 sekolah dengan jumlah murid 11.556 dan jumlah guru

784. SMA selama tahun 2021 tercatat sebanyak 30 sekolah dengan murid sebanyak 17.971 dan jumlah guru 1.153.

Dengan melihat angka-angka yang ada pada tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa terbanyak ada pada tingkat SMA, dan jumlah siswa terkecil adalah pada tingkat SMP. Untuk jumlah gedung SMA di Kota Blitar sudah cukup memadai.

Tabel 3.22
Rasio Murid - Guru SD Kota Blitar Tahun 2021

Kota	Sekolah Dasar (SD)			
	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kecamatan				
Sananwetan	23	7.503	464	16.17
Sukorejo	25	4.449	283	15.72
Kepanjenkidul	25	5.351	339	15.78
Kota Blitar	73	17.303	1.086	15.93

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Kota Blitar

Tabel 3.23
Rasio Murid - Guru SMP Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid - Guru
Kota Blitar	27	11.556	784	14,74

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.24
Rasio Murid-Guru SMA Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Sekolah Menengah Atas (SMA)			
	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kota Blitar	30	17.971	1.153	15,59

Sumber : BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur

3.6 Ketenaga Kerjaan

3.6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data BPS Jawa Timur bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian. Indikator ini merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pada tahun 2021, TPAK di Kota Blitar tercatat sebesar 69,96 %. Angka ini sedikit menurun dibandingkan TPAK pada tahun 2019 yang mencapai 72,15 %. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap tahun jumlah penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian semakin sedikit atau menurun.

Tabel 3.25
Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)			
	2017	2018	2019	2021
Kota Blitar	71,90	72,21	72,15	69,96

Sumber : BPS Jawa Timur - Laporan Eksekutif keadaan Angkatan Kerja



3.6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

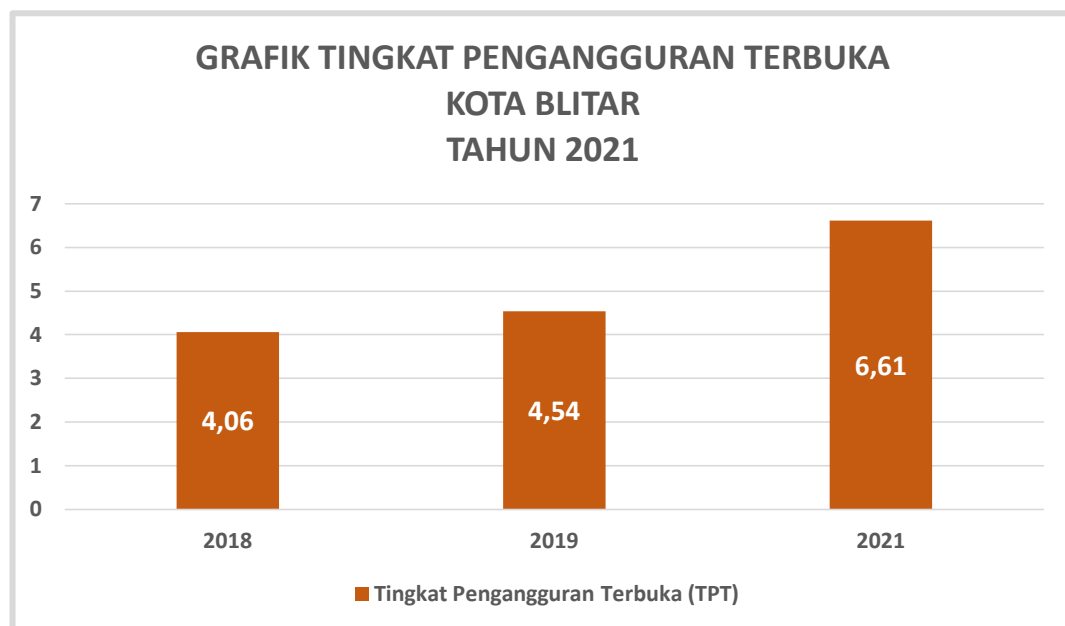
Berdasarkan data BPS Jawa Timur khususnya Laporan Eksekutif keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur bahwasanya Indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja terhadap jumlah angkatan

kerja. Dengan mengetahui lebih lengkap informasi mengenai tingkat pengangguran di Jawa Timur, diharapkan kebijakan yang akan diambil pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Tahun		
	2018	2019	2021
Kota Blitar	4,06	4,54	6,61

Sumber : BPS Jawa Timur - Laporan Eksekutif keadaan Angkatan Kerja



Pada tahun 2021 TPT di Kota Blitar mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 6,61% dari 4,54% pada tahun 2019. Dengan TPT sebesar 6,61%, dapat diterjemahkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6-7 orang pengangguran. Ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Blitar, karena jumlah pengangguran tersebut bukan jumlah yang sedikit sehingga upaya dalam menekan angka pengangguran di Kota Blitar masih

diperlukan. Salah satu penyebab masalah pengangguran meningkat di tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19, dimana banyak perusahaan swasta yang mengalami penurunan omset atau bahkan ada yang mengalami kebangkrutan, sehingga tidak bisa melanjutkan usahanya. Perusahaan yang mengalami penurunan omset akan mengurangi juga jumlah tenaga kerjanya, sedangkan perusahaan yang bangkrut akan memberhentikan semua pekerjanya. Hal lain yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah pola pikir pada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah atau perusahaan. Hal ini salah satunya terlihat dari fenomena penganggur terdidik atau mereka yang berpendidikan tinggi (SMA sederajat atau Perguruan Tinggi) dan berstatus menganggur. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia di kedua lini tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, masih rendahnya kualitas tenaga kerja pun menjadi kendala lain yang masih dihadapi dalam permasalahan ketenagakerjaan di Kota Blitar.

3.7 Data Pembangunan Keluarga

3.7.1 Jumlah keluarga sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera

3.7.1.1 Keluarga Pra Sejahtera

Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2010, Keluarga Pra *Sejahtera* adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

3.7.1.2 Keluarga Sejahtera

Indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2010, Keluarga Sejahtera yaitu keluarga yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

3.7.2 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Program Bina Keluarga Balita (BKB) menjadi salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan semenjak anak dalam kandungan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pos pelayanan terpadu (posyandu), bina keluarga balita (BKB), pendidikan anak usia dini (PAUD) yang pelayanannya dilaksanakan secara holistik integratif.

Tabel 3.27
Jumlah Bina Keluarga Balita
Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Kelompok BKB			Keluarga Anggota BKB		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kecamatan						
Sananwetan	60	35	35	2.080	2080	1983
Sukorejo	30	21	21	709	507	512
Kepanjenkidul	21	21	21	592	543	536
Kota Blitar	111	77	77	3.381	3.130	3.031

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin



Jumlah kelompok BKB di Kota Blitar mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami banyak penurunan, tahun 2019 jumlah kelompok BKB yang ada 111 dan pada tahun 2020 jumlahnya menjadi 77. Pengurangan terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan, sedangkan Kecamatan Kepanjenkidul tetap. Pada tahun 2021 jumlah kelompok BKB di Kota Blitar tidak mengalami perubahan. Untuk jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 jumlahnya adalah 3.381, pada tahun 2020 menjadi 3.130 dan pada tahun 2021 menjadi 3.031. Hal ini disebabkan karena PUS di Kota Blitar sudah sadar untuk ikut KB, sehingga berakibat penurunan jumlah keluarga yang memiliki balita.

3.7.3 Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun dan belum menikah. Program ini merupakan aplikasi dari program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Bina Keluarga Remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua

dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok. Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) khususnya untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri.

Bina Keluarga Remaja dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari orang tua dan anak remaja yang dibimbing dan dibantu oleh fasilitator/motivator/kader dari tenaga masyarakat secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah. Program Bina Keluarga Remaja merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman orang tua dalam mendidik anak remaja yang benar yang dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kegiatan, dimana orang tua mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan dan membina tumbuh kembang anak remaja.

Melalui kelompok Bina Keluarga Remaja setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja dalam konteks fenomena pernikahan dini, meliputi Pendewasaan Usia Perkawinan, Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja, dan Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja.

Pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program GenRe, Penanaman NilaiNilai Moral Melalui 8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS, Keterampilan Hidup, Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender, Komunikasi Efektif

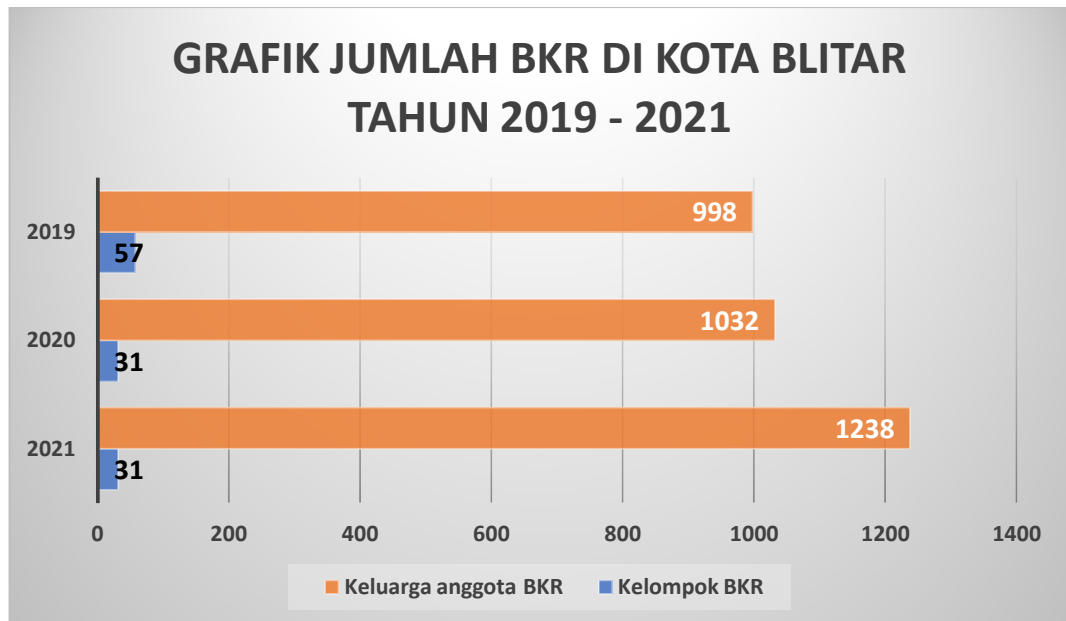
Orang tua terhadap Remaja, Peran Orang tua dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja, Kebersihan dan Kesehatan Diri Remaja, dan Pemenuhan Gizi Remaja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program Bina Keluarga Remaja adalah program yang dibuat untuk membentuk karakter remaja melalui keluarga dan pola asuh orang tua, yang telah diidentifikasi sebagai pengaruh penting dalam pembentukan karakter remaja. Proses pola asuh orang tua meliputi kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua, dan komunikasi orang tua dengan remaja. (BKKBN, 2012).

Tabel 3.28
Jumlah Bina Keluarga Remaja
Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Kelompok BKR			Keluarga Anggota BKR		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sananwetan	21	7	7	483	483	587
Sukorejo	19	15	15	325	216	316
Kepanjenkidul	17	9	9	190	333	336
Kota Blitar	57	31	31	998	1032	1238

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin



Jumlah kelompok BKR di Kota Blitar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 57 kelompok di tahun 2019 menjadi 31 kelompok di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kelompok BKR tidak mengalami perubahan. Sedangkan jumlah keluarga anggota BKR dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari 998 keluarga di tahun 2019 menjadi 1.032 keluarga di tahun 2020 dan pada tahun 2021 bertambah lagi menjadi 1.238 keluarga. Meningkatnya jumlah keluarga yang menjadi anggota BKR disebabkan karena para orang tua dan keluarga remaja sadar kondisi di masyarakat saat ini yang bisa memberi pengaruh negatif kepada para remaja, oleh karena itu para orang tua dan keluarga remaja butuh informasi-informasi seputar remaja yang bisa didapatkan melalui kelompok BKR.

3.7.4 Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

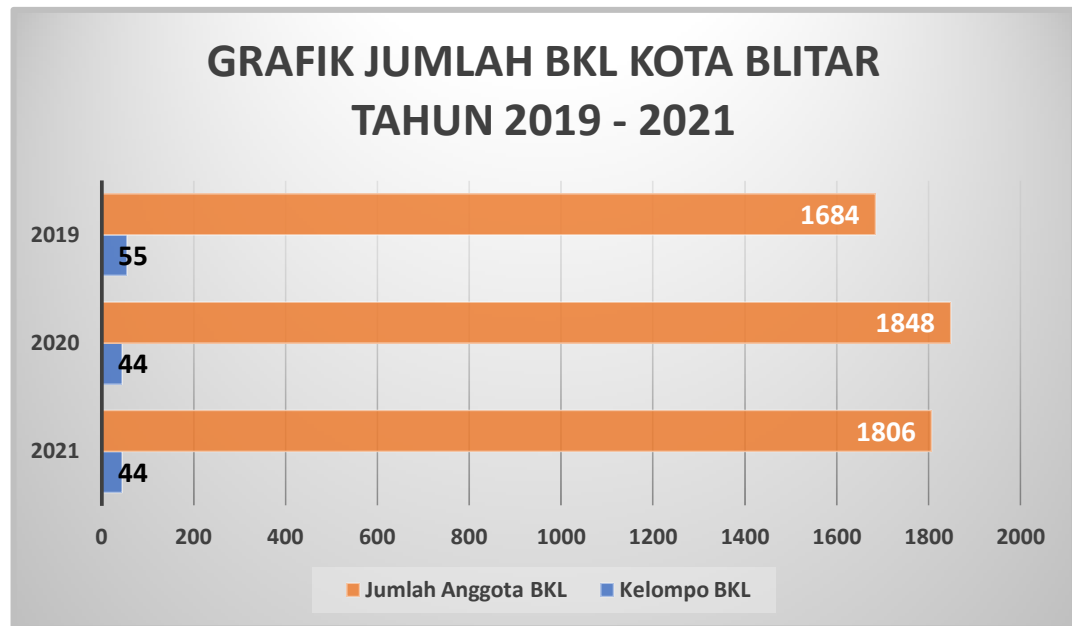
BKKBN merupakan salah satu lembaga yang memberikan suatu wadah bagi lanjut usia dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan yang berintegrasi dengan Kelompok Kerja (POKJA). Salah satu program yang dikembangkan saat ini adalah Bina Keluarga Lansia

(BKL). BKL menurut BKKBN adalah wadah kegiatan bagi lanjut usia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lanjut usia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lanjut usia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan serta pengembangan potensi bagi lanjut usia.

Tabel 3.29
Jumlah Bina Keluarga Lansia
Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Kelompok BKL			Keluarga Anggota BKL		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kecamatan						
Sananwetan	17	12	12	1.035	1.035	993
Sukorejo	21	16	16	396	372	372
Kepanjenkidul	17	16	16	253	441	441
Kota Blitar	55	44	44	1.684	1.848	1.806

Sumber : BKKBN Laporan Statistik Rutin



Kelompok BKL di Kota Blitar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 55 kelompok di tahun 2019 menjadi 44 kelompok di tahun 2020. Sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah kelompok BKL tetap yaitu 44. Untuk keluarga yang memiliki lansia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah keluarga lansia mengalami penurunan. Jumlah keluarga lansia pada tahun 2020 adalah 1.848 dan pada tahun 2021 menjadi 1.806. Meskipun demikian kegiatan di kelompok BKL ini harus tetap ditingkatkan agar lansia di Kota Blitar bisa menjadi lansia yang tangguh.

3.7.5 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari tahapan Keluarga Sejahtera, baik pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkannya.

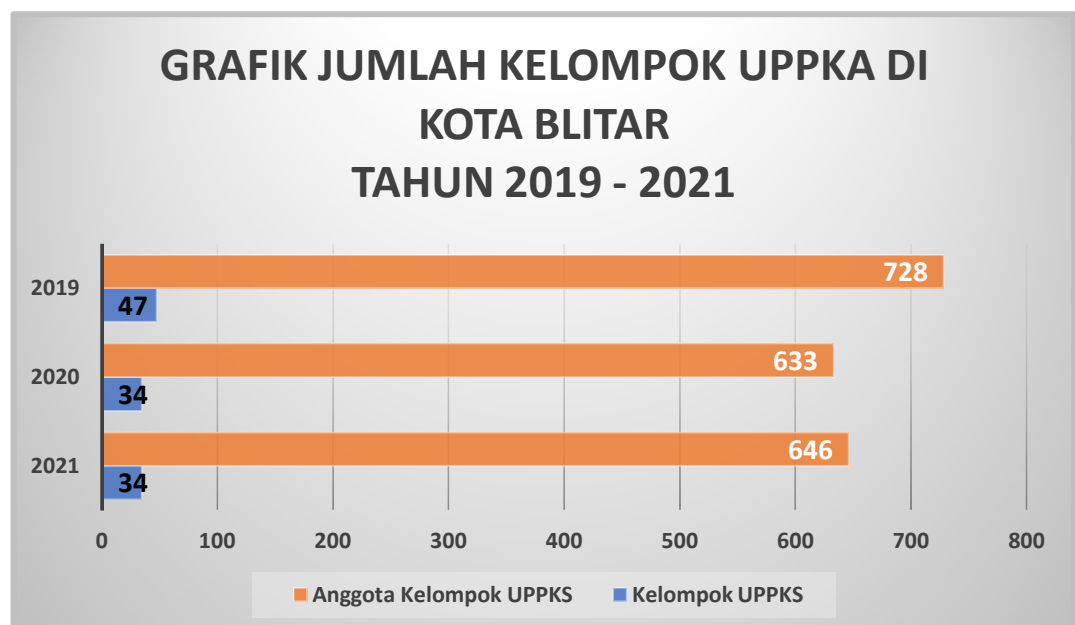
Anggota UPPKA adalah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta Keluarga Berencana (KB), Remaja dan Lanjut Usia.

Tujuan UPPKA adalah mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Tabel 3.30
Jumlah Kelompok UPPKS Kota Blitar Tahun 2021

Kota Blitar	Kelompok UPPKS			Anggota Kelompok UPPKS			Pertemuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kecamatan									
Sananwetan	9	9	9	225	251	257	0	1	8
Sukorejo	21	16	16	212	190	197	4	11	7
Kepanjenkidul	17	9	9	291	192	192	17	4	7
Kota Blitar	47	34	34	728	633	646	21	16	22

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin



Jumlah kelompok UPPKA di Kota Blitar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 47 kelompok menjadi 34 kelompok, dan pada tahun 2021 jumlah kelompok UPPKA tidak ada perubahan, sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 34 kelompok. Untuk jumlah anggota kelompoknya di tahun 2020 mengalami penurunan dari 728 di tahun 2019 menjadi 633 di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah anggota kelompok UPPKA mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020 jumlah anggota kelompok UPPKA yaitu 728 dan pada tahun 2021 jumlah anggota kelompok UPPKA menjadi 646. Dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKA menunjukkan bahwa pembinaan kelompok-kelompok UPPKA sudah membawa hasil yang baik. Meskipun di tahun 2021 ada peningkatan jumlah anggota UPPKA di Kota Blitar pembinaan kelompok-kelompok UPPKA tersebut tetap dipertahankan, agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya dan jumlah anggotanya bisa meningkat lagi.

3.8 Data Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana

3.8.1 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

PKB merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Bila dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jabatannya, para Penyuluh KB adalah juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB

Peran PKB adalah Pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di desa/kelurahan, .penggerak partisipasi masyarakat

dalam program KB Nasional di desa/kelurahan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan, menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan

Fungsi PLKB/PKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

TUGAS, FUNGSI DAN PERAN AKTIFITAS KEGIATAN

PKB	PLKB
- Melakukan Penyuluhan Program KKBPK - Melakukan Pelayanan Program KKBPK - Melakukan Penggerakan Program KKBPK - Melakukan Pengembangan Program KKBPK	- Perencanaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan - Pengembangan
- Pembuatan Potensi Wilayah Perencanaan - Pendataan Keluarga Pendataan dan	Pembuatan Potensi Wilayah
- Advokasi dan KIE - Pengembangan media Advokasi dan KIE, Konseling - Pembuatan Materi - Pelaksanaan rakor	Pembinaan IMP dan Mitra Kerja Fasilitasi Peran IMP dan Mitra Kerja Dukungan Pelayanan KIE/Konseling dan Advokasi
- Fasilitasi Kelompok Poktan Fasilitasi - Pelayanan KB Pencatatan dan Pelaporan	Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 3.31

Jumlah PKB/PLKB Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kota Blitar	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Plkb/Pkb/ Petugas Kb Desa/Kel.	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Plkb/ Pkb/P etugas Kb	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Plkb/Pk b/Petugas Kb Desa/Kel.
	2019			2020			2021		
Sananwetan	1	7	5	1	7	5	1	7	4
Sukorejo	1	7	5	1	7	4	1	7	4
Kepanjenkidul	1	7	4	1	7	4	1	7	4
Kota Blitar	3	21	21	3	21	13	3	21	12

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin

Kota Blitar memiliki jumlah PKB yang cukup ideal, yaitu 12 orang dengan jumlah Kelurahan 21. Jadi 1 orang PKB mendapatkan 1 sampai dengan 2 wilayah binaan.

3.8.2 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD

Pengertian Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa/kelurahan sedangkan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program KKBPK di tingkat dusun/RW.

Tabel 3.32
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD Kota Blitar
Tahun 2021

Kota Blitar	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Ppkbd	Sub Ppkbd	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ppkbd	Sub Ppkbd	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ppkbd	Sub Ppkbd
	2019				2020				2021			
	Kabupaten											
Sananwetan	1	7	7	118	1	7	7	117	1	7	11	118
Sukorejo	1	7	7	91	1	7	7	96	1	7	8	91
Kepanjenkidul	1	7	7	104	1	7	7	104	1	7	9	104
Kota Blitar	3	21	21	313	3	21	21	317	3	21	28	313

Sumber : BKKBN – Laporan Statistik Rutin

3.9 Kampung Keluarga Berencana

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.

Ada beberapa hal yang melatar belakangnya, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) mewujudkan cita- cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia", (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program

KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, dan partisipasi aktif masyarakat

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah- wilayah pinggiran yaitu kampung. Karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju. Dan apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

3.10 Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkbbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "satuan wilayah kelurahan yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis".

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

Sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah

pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

Tabel 3.33
Jumlah Kampung KB Kota Blitar Tahun 2020-2021

Kecamatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Total Kelurahan	Kec yang telah mencanangkan	Jumlah Kampung KB	Total Kelurahan	Kel. yang telah mencanangkan	Jumlah Kampung KB
Sananwetan	7	2	2	7	2	2
Sukorejo	7	3	3	7	3	3
Kepanjenkidul	7	1	1	7	1	1
Kota Blitar	21	6	6	21	6	6

Sumber: Aplikasi Kampung KB BKKBN

Jumlah Kambpung KB di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan, yaitu berjumlah 6 kampung KB.

3.11 Sekolah Siaga Kependudukan

Pendidikan Kependudukan adalah masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan (kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang menintegrasikan Kependudukan, KB dan Pembanbunan Keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan (*population corner*) sebagai salah

satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan Generasi Berencana (GenRe).

Tabel 3.34
Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan
Kota Blitar Tahun 2021

No	Kota Blitar	Sekolah Siaga Kependudukan
1	Tahun 2021	1

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Tren capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Blitar relative stanan dan masih di dibawah angka 1 (satu). Hal ini menunjukan bahwa Program Pengendalian Penduduk di Kota Blitar relative berhasil.
- b. Pada tahun 2021 capaian Usia Kawin Pertama (UKP) di bawah umur 20 tahun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian Usia Kawin Pertamam (UKP) di tahun 2020. Capaian UKP di tahun 2020 yaitu 13,26 % dan pada tahun 2021 menurun menjadi 10,65 %. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan di Kota Blitar sudah menampakkan hasil yang positif. Namun demikian pemerintah Kota Blitar tidak boleh lengah, Pemerintah Kota Blitar harus tetap menggencarkan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan agar di tahun-tahun berikutnya jumlah pernikahan di bawah umur 20 tahun semakin mengecil.
- c. Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan KB suntik masih tinggi, meskipun sudah diberikan KIE tentang dampak positif dan negatif masing-masing alat kontrasepsi, namun tetap saja memilih suntik karena akseptor merasa suntik lebih praktis dan tidak perlu memasukan alat kontrsepsi dalam tubuh.
- d. Pada kegiatanTri Bina, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah kelompoknya tetap 77 kelompok, sedangkan jumlah anggota kelompoknya mengalami penurunan yaitu 3.130 di tahun 2020 menjadi 3.031 di tahun 2021. Untuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) jumlah kelompoknya tetap 31 kelompok, tetapi jumlah anggotanya mengalami peningkatan dari 1.032

di tahun 2020 menjadi 1.239 di tahun 2021. Sedangkan untuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) jumlah kelompoknya tetap tetapi jumlah anggotanya mengalami penurunan dari 1.848 di tahun 2020 menjadi 1.806 di tahun 2021. Ini berarti dari kegiatan Tri Bina ini hanya kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang jumlah anggota kelompoknya mengalami peningkatan, sedangkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) jumlah anggotanya mengalami penurunan. Untuk meningkatkan jumlah anggota kelompok BKB dan BKL ada beberapa usaha yang harus kita lakukan, usaha-usaha tersebut diantaranya adalah meningkatkan pembinaan baik melalui KIE pada masyarakat maupun pendekatan pada tokoh agama/masyarakat tentang pentingnya ikut dalam kegiatan kelompok BKB dan BKL, sehingga keluarga yang memiliki balita dan lansia sadar akan pentingnya ikut kegiatan tsb. Usaha yang berikutnya adalah meningkatkan pelayanan dari pihak penyelenggara kegiatan BKB dan BKL agar keluarga balita dan keluarga lansia tertarik untuk mengikuti kegiatan BKB dan BKL yang pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah anggota kelompok BKB dan BKL.

- e. Jumlah Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masih statnan secara kwanntitas yaitu 34 kelompok, tetapi jumlah anggota kelompoknya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKS, pembinaan keanggotaan dan peningkatan kualitas kelompok harus tetap dilakukan agar kelompok-kelompok UPPKS di Kota Blitar bisa lebih meningkatkan kualitas kelompoknya yang pada akhirnay akan berdampak pada peningkatan jumlah anggota kelompok UPPKS.
- f. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) secara kuantitas sejumlah 28 orang dan Sub PPKBK sejumlah 313 orang. PPKBK dan Sub di Kota Blitar diberikan insentif. Untuk PPKBK diberikan sebesar Rp.100.000, per bulan sedang untuk Sub diberikan Rp.50.000 perbulan.

PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/ mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat kelurahan, sedangkan Sub PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan / mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ditingkat dusun/RW

4.2 Saran

- a. Optimalisasi peran PPKBK dan Sub PPKBK serta Penyuluh KB (PKB) sebagai institusi lini lapangan dalam mensukseskan imlementasi Program KKBPK di lapangan
- b. Perlunya kerjasama yang berkesinambungan dari seluruh sektor untuk memajukan program KKBPK
- c. Dalam pelaksanaan penyusunan profil ini masih diperlukan penyempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.